



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MIKRO YANG
EFEKTIF(STUDI KASUS PADA PT. BPR BANDUNG KIDUL)**

SKRIPSI

**TEDDY SURYA LATIEF
0906608960**

**PROGRAM EKSTENSI
FAKULTAS EKONOMI**

**JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MIKRO YANG
EFEKTIF(STUDI KASUS PADA PT. BPR BANDUNG KIDUL)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi**

**TEDDY SURYA LATIEF
0906608960**

**PROGRAM EKSTENSI
FAKULTAS EKONOMI**

**JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Teddy Surya Latief

NPM : 0906608960

Tanda Tangan : 

Tanggal : 15 Juni 2012

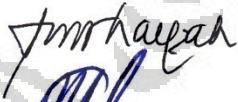

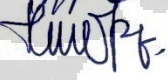
HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Teddy Surya Latief
NPM : 0906608960
Program Studi : Ekstensi

Judul Skripsi
-> Bahasa Indonesia : Analisa Pengaruh Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit Mikro yang Efektif (Studi Kasus Pada PT. BPR Bandung Kidul)
-> Bahasa Inggris : Analysis Of The Influence Of Internal Control In The Provision Of Effective Micro Credit (case study on The PT. BPR Bandung Kidul)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekstensi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	: Sri Nurhayati, SE, MM., S.A.S	()
Penguji Skripsi	: Salim Siagian S.E., MBA	()
Anggota penguji	: Vera Diyanti S.E., M.M	()

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 3 Juli 2012

Ketua Program Ekstensi Akuntansi,



Sri Nurhayati, SE, MM., S.A.S
NIP. : 19600317 198602 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Sri Nurhayati S.E., M.M., S.A.S, selaku Ketua Program Ekstensi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ;
2. Bapak Salim Siagian S.E., MBA, selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Seluruh staf sekretariat dan tenaga pengajar yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu yang berguna bagi penulis selama menempuh pendidikan di Program Ekstensi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia ;
4. Bapak Drs. Asep Syaiful Bachri selaku Direktur PT. BPR bandung Kidul yang telah baik hati mau meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara sehingga membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bapak Lalan Soetarnan, SE selaku Satuan Pengawas Internal yang telah baik hati mau meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara sehingga membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak U. Syamsu selaku Staf Analis Kredit yang telah baik hati mau meluangkan waktunya untuk dapat melakukan wawancara sehingga membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

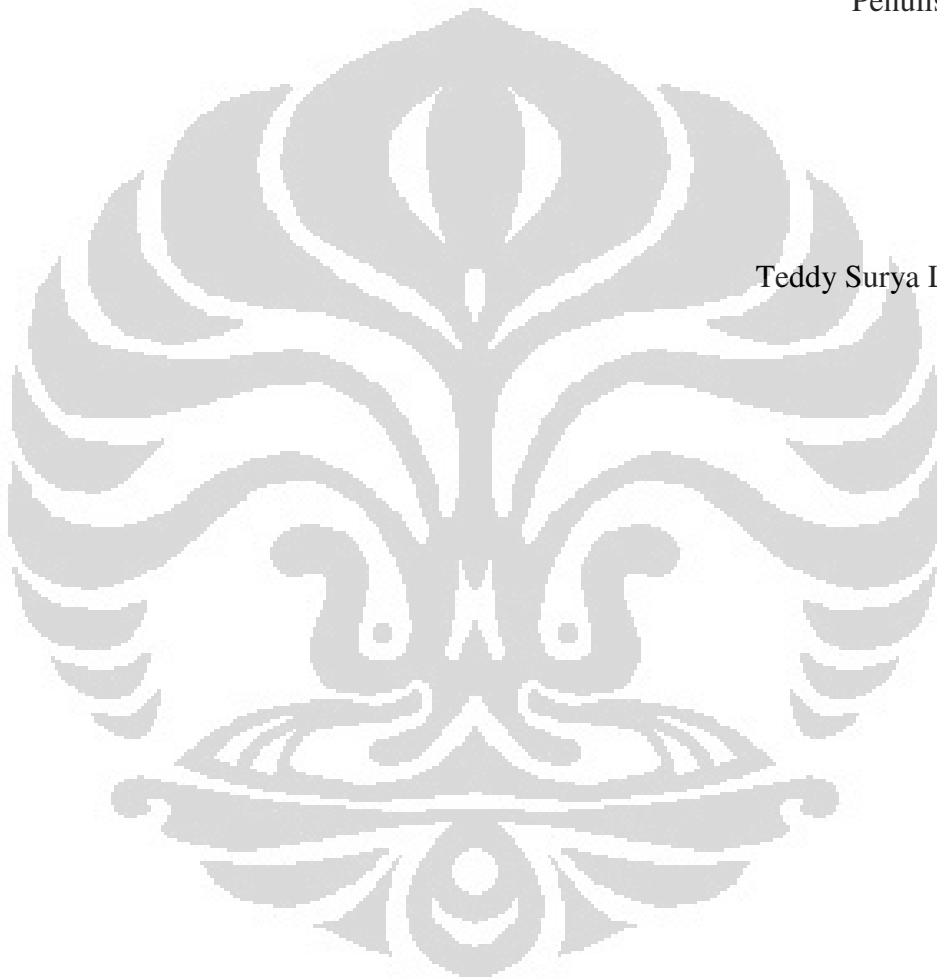
7. Karyawan PT. BPR Bandung Kidul yang telah berbaik hati mau meluangkan waktunya untuk dapat membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
8. Kedua Orang Tua penulis, terima kasih tiada tara untuk Ibu tercinta dan Almarhum Bapak tercinta atas segala dukungan moril, materil, dan khususnya doa dari kalian. Tanpa dukungan kalian penulis tidak mungkin bisa sampai sejauh ini dalam menempuh pendidikan, semoga ilmu yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan dapat memberikan manfaat bagi penulis , keluarga, dan masyarakat.
9. Tidak lupa untuk adikku (Danny) dan (Endah), dan keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat terus melanjutkan pendidikan walaupun harus melalui berbagai rintangan dan atas bantuan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan untuk teman baik saya Taufik Ismail yang telah banyak membantu penulis didalam pembuatan skripsi ini karena kontribusinya yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Program Ekstensi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, khususnya angkatan 2009. Afrida, Ermila, Gladiola, Nuki, Pandu (Tito), Pramono, William, Hendro, Elly, Lastario (Rio), dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala kerjasamanya, dukungan, semangat, serta doa yang telah diberikan selama sama-sama menempuh pendidikan. Semoga apa sudah kita jalani selama ini tidak sia-sia dan hubungan silaturahmi diantara kita semua akan terus terjaga sampai kapanpun.
12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 Juni 2012

Penulis

Teddy Surya Latief



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Teddy Surya Latief
NPM : 0906608960
Program Studi : Ekstensi
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
JenisKarya : Skripsi

demikian mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalti Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
PEMBERIAN KREDIT MIKRO YANG EFEKTIF(STUDI KASUS PADA PT.
BPR BANDUNG KIDUL)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2012

Yang menyatakan



(Teddy Surya Latief)

ABSTRAK

Nama : Teddy Surya Latief
Program Studi : Ekstensi Akuntansi
Judul : Analisis Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap
Pemberian Kredit Mikro Yang Efektif (Studi Kasus pada
PT. BPR Bandung Kidul)

Penelitian ini membahas mengenai analisis kesesuaian pengendalian intern kredit yang ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit usaha mikro dengan pengendalian internal menurut pedoman standar sistem pengendalian intern perbankan, analisis apakah pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif, dan analisis pengaruh pengendalian internal terhadap efektifitas pemberian kredit mikro. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain deskriptif. Penelitian dilakukan dengan memperoleh data-data, mengolahnya, serta menganalisisnya. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa elemen pengendalian internal yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif karena tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi, dan pengendalian internal PT. BPR Bandung Kidul mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit mikro karena dengan tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.

Kata Kunci:
Pengendalian Internal, Pemberian Kredit, Kredit Mikro

ABSTRACT

Name : Teddy Surya Latief
Study Program : Ekstensi Akuntansi
Title : Analysis of The Influence of Internal Control In the Provision of Effective Micro Credit (case study on The PT. BPR Bandung Kidul)

This study discusses the analysis of the suitability of internal controls established by the bank credit in the provision of micro credit to the internal control standards under the guidelines of the banking system of internal control, analysis of whether the provision of micro credit is determined by the bank have been effective, and analysis of the influence of the effectiveness of internal control micro-credit. This study is a descriptive research design. The study was conducted to obtain data, process it and analyze it. From the research, it is known that the internal control of credit made by PT. Rural South London still not done properly because there are still some elements of internal control is still not implemented to the maximum, micro lending set by the bank have been effective for the achievement of credit from the point of BPR as indicated by the provision of credit in an amount sufficient large, the current bills, and provide benefits while the achievement of micro-enterprise lending is indicated by the success of the work done by the leading indicator of customer loans could be repaid, and internal control PT. BPR Bandung Kidul have an influence on the effectiveness of micro credit for the achievement of credit from the point indicated by the provision of loans in large numbers, the current bills, and provide benefits while the achievement of micro-enterprise lending business success is indicated by the customer carried by the main indicators of the loan can be repaid.

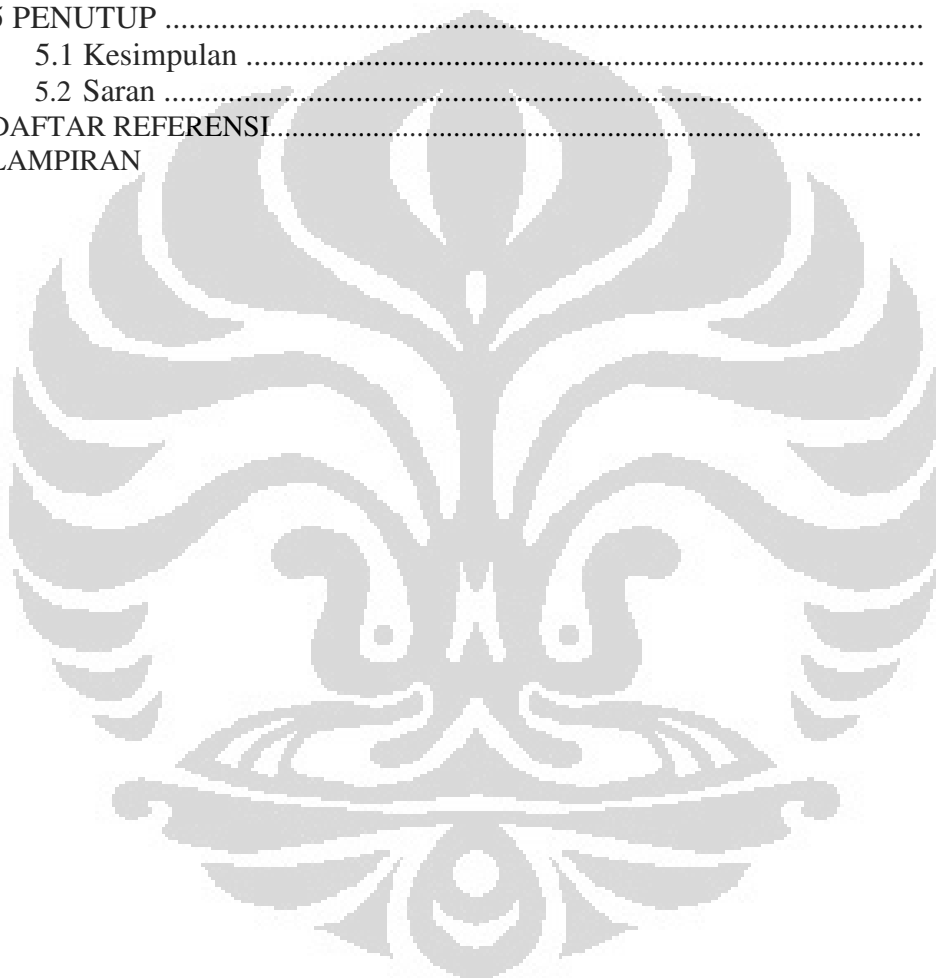
Key words:

Internal Control, provision of credit, Micro credit

DAFTAR ISI

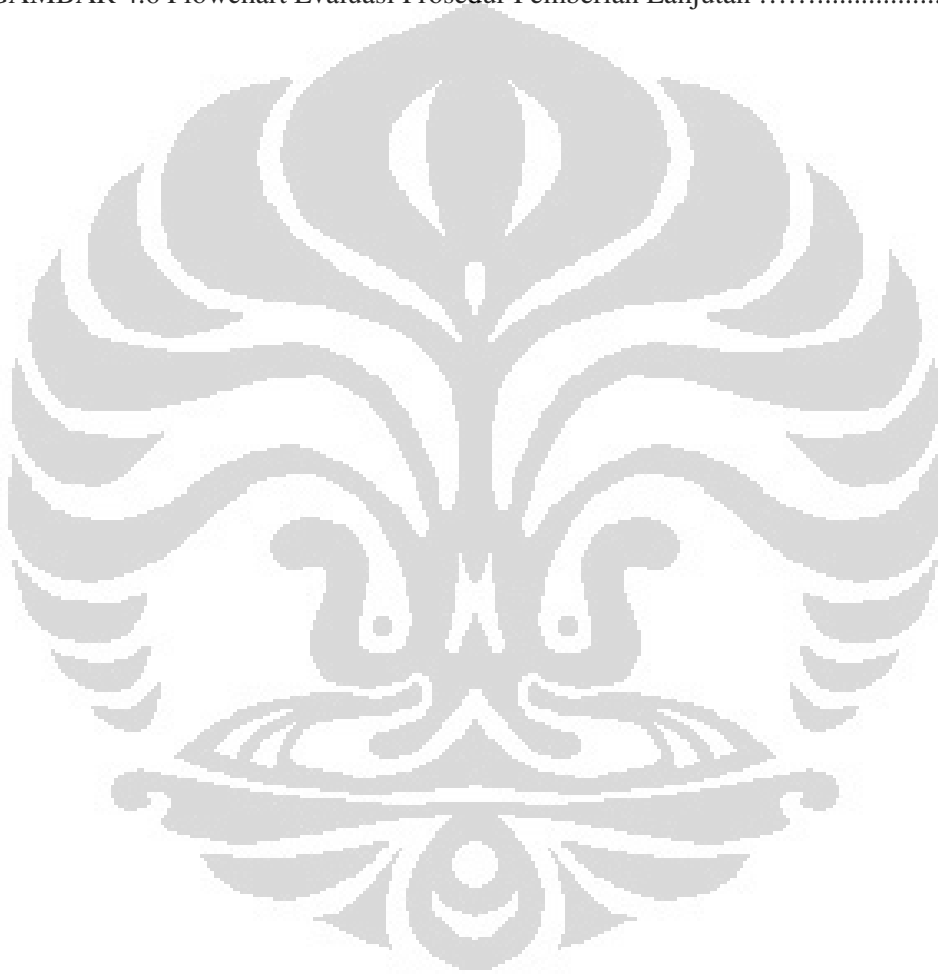
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup dan pembatasan masalah	4
1.6 Metodologi Penelitian	4
1.6.1 Metode Penelitian	4
1.6.2 Pengumpulan Data	5
1.7 Waktu dan Lokasi Penelitian	5
1.8 Sistematika Penulisan	5
2. LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Pengertian Bank	7
2.1.1 Fungsi dan Tujuan Bank	7
2.1.2 Usaha Bank Perkreditan Rakyat	7
2.2 Perkreditan	8
2.2.1 Pengertian Kredit	8
2.2.2 Kredit Mikro	8
2.2.3 Prinsip Kredit	9
2.2.4 Unsur-unsur Kredit	10
2.2.5 Tujuan Pemberian Kredit	11
2.2.6 Fungsi Kredit	11
2.2.7 Jenis-jenis Kredit Perbankan	11
2.2.8 Penggolongan kredit Bermasalah	13
2.2.9 Jaminan dan Agunan	14
2.3 Pengertian Efektivitas	15
2.4 Pengendalian Internal	15
2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal	15
2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal	21
2.5 Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit	22
3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	25
3.1 Profil	25
3.2 Struktur Organisasi	26
3.3 Produk yang Ditawarkan	27

4. PEMBAHASAN.....	28
4.1 Pengendalian Internal Pemberian Kredit.....	28
4.2 Pemberian Kredit Mikro.....	34
4.2.1 Pedoman Pemberian Kredit Mikro	34
4.2.2 Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro	40
4.3 Evaluasi	46
4.3.1 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit	46
4.3.2 Evaluasi Pemberian Kredit Mikro	55
4.4 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Mikro yang Efektif	60
5 PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	66
DAFTAR REFERENSI.....	69
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 Struktur Organisasi	26
GAMBAR 4.1 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit	37
GAMBAR 4.2 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Lanjutan.....	38
GAMBAR 4.3 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Lanjutan.....	39
GAMBAR 4.4 Flowchart Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit	43
GAMBAR 4.5 Flowchart Evaluasi Prosedur Pemberian Lanjutan	44
GAMBAR 4.6 Flowchart Evaluasi Prosedur Pemberian Lanjutan	45



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kredit dalam istilah perekonomian merupakan suatu penundaan pembayaran, artinya uang atau barang yang diterima akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Bila tidak ada jangka waktu maka bank akan mengalami kesulitan dalam masalah pembayaran.

Besar kecilnya dana dalam kondisi apapun akan tetap terbatas sementara kebutuhan akan kredit terus menuntut selama manusia berusaha menjalankan usahanya, Permintaan akan suplai kredit akan terus mengalir ke bank apakah setiap hari, setiap minggu, atau setiap saat. Keadaan tersebut tentu harus selalu dipikirkan dan di perhatikan oleh bank kapan, bagaimana, dan berapa yang diberikan oleh bank untuk suplai kreditnya

Salah satu dari tugas pokok bank adalah memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya. Kredit ini pada umumnya ditujukan untuk kegiatan yang produktif. Dengan memberikan kredit atau fasilitas pinjaman, bank telah memberikan uang atau dana dan kepercayaan (*credere*). Bank memperoleh pengembalian pokok pinjaman sebagai imbalan dari dana yang diberikan serta bunga sebagai imbalan atas kepercayaan yang diberikan. Dalam hal ini kepercayaan itu “dapat dianggap sebagai jasa”. Dengan demikian bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah dengan cara memperbesar dana, memperluas dan jasa-jasa bank, peningkatan kualitas pelayanan dengan sistem pemasaran yang terpadu.

Dalam menyalurkan dana masyarakat tersebut, sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perbankan, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan bank dan nasabahnya, hal ini karena pemberian kredit merupakan kegiatan usaha pokok bank yang mengandung risiko tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha bank, karena pemberian kredit yang tidak sehat akan mengakibatkan kredit bermasalah. Hal ini akan

menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak bank dan akan mempersulit bank dalam pendanaan.

Masalah keamanan kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena ada resiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Resiko itu sebagian besar dapat dihindari dengan adanya pengendalian intern yang bagus dalam bidang perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian yang dapat menunjang efektifitas pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam pemberian kredit, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam tubuh bank tersebut.

Manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat mengamankan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Efektifitas sangat berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, maka untuk mencapai efektifitas sistem pemberian kredit perlu diketahui tujuan pemberian kredit yang diharapkan. Untuk itu bagian perkreditan perlu menetapkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan pemberian kredit. Dalam hal ini digunakan prinsip perkreditan yang lebih dikenal dengan prinsip 5C, yaitu character, capacity, capital, collateral dan condition of economic. Apabila prinsip-prinsip tersebut terpenuhi, diharapkan tujuan pemberian kredit akan tercapai. Di samping itu perlu dilaksanakannya prosedur pemberian kredit yang meliputi permohonan kredit, analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit serta pencairan kredit.

Selain terpenuhinya prinsip dan prosedur pemberian kredit, suatu sistem pemberian kredit dapat dikatakan efektif apabila kredit tersebut dapat kembali sesuai waktu yang ditetapkan dengan sejumlah bunga yang telah ditentukan. Prioritas pemberian kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas sistem pemberian kredit akan tercapai. Setiap bank harus memiliki struktur pengendalian internal yang memadai dalam perkreditan untuk mencegah penyalagunaan wewenang.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal memberikan sumbangan pendapatan yang cukup besar bagi bank, namun kredit merupakan kegiatan dan jasa bank yang penuh dengan risiko yang cukup rumit maka dari itu Bank harus memiliki suatu sistem pengendalian dalam proses pemberian kredit, sehingga dengan adanya pengendalian intern terhadap pemberian kredit dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak dan terhindar dari praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka peneliti memilih judul “Analisa Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Mikro Yang Efektif (Studi Kasus Pada PT. BPR Bandung Kidul)”.

1.2 Rumusan masalah

1. Apakah pengendalian intern kredit yang ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit usaha mikro telah sesuai dengan pengendalian internal menurut pedoman standar sistem pengendalian intern perbankan?
2. Apakah pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif?
3. Apakah pengendalian internal kredit berpengaruh dalam pemberian kredit mikro yang efektif?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengendalian intern kredit yang ditetapkan oleh bank dalam pemberian kredit usaha mikro telah sesuai dengan pengendalian internal menurut pedoman standar sistem pengendalian intern perbankan
2. Untuk mengetahui apakah pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif
3. Untuk mengetahui apakah pengendalian internal kredit telah berpengaruh dalam pemberian kredit mikro yang efektif

1.4 Manfaat penelitian

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengendalian internal dan peranannya terhadap efektivitas pemberian kredit dan untuk mengetahui sejauh mana kaitan antara teori dengan penerapannya.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan yang dapat memberikan manfaat dalam mengelola pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro sehingga tujuan pemberian kreditnya tercapai dan dilakukan secara efektif.

3. Pihak lain

Dapat menjadi referensi untuk pembaca yang ingin mengambil tema penelitian yang sama dan juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

1.5 Ruang lingkup penelitian dan pembatasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas pengendalian internal dalam pemberian kredit mikro dalam menunjang pemberian kredit mikro.

Dan dalam kesempatan ini tujuan pemberian kredit mikro dibatasi pada kredit mikro untuk pengembangan usaha, dengan demikian pengertian tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari dua sudut yaitu dari sudut BPR dan dari sudut peminjam. Tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan kredit usaha mikro dianggap berhasil apabila kredit tersebut dapat menunjang keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode penelitian

metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. studi pustaka, yaitu dengan cara mempelajari buku literatur, majalah, karya ilmiah, ataupun dokumen lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini
2. penelitian lapangan, yaitu studi yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan peninjauan secara langsung pada lokasi perusahaan, dengan cara:
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti
 - b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab karyawan yang kompeten.

1.6.2 Pengumpulan data

Ada dua jenis data yang dipakai didalam penelitian ini yaitu :

- **Data primer**

Data primer merupakan data-data yang didapatkan oleh penulis dilapangan (field research).

- **Data sekunder**

Selain data primer yang merupakan data utama dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan membaca literatur baik dalam bentuk buku, majalah, koran, internet dan lain-lain.

1.7 Waktu dan lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. BPR Bandung Kidul di Jalan Raya Pangalengan No. 340 Pangalengan- Kabupaten Bandung. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan mulai bulan Desember 2011 sampai dengan bulan Maret 2012.

1.8 Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I berisi mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat adanya penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, penulis membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penulisan skripsi.

BAB III: PROFIL PT. BPR BANDUNG KIDUL

Bab III ini berisi tentang sejarah profil PT. BPR BANDUNG KIDUL

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan metodologi penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan

BAB V: ANALISA PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MENUNJANG TERCAPAINYA PEMBERIAN KREDIT MIKRO YANG TEPAT GUNA DAN TEPAT SASARAN (STUDI KASUS PADA PT. BPR BANDUNG KIDUL).

Dalam bab IV ini membahas tujuan penelitian.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1 Fungsi dan Tujuan Bank

Definisi Bank berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 pasal 1 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Kemudian disebutkan dalam pasal 3 bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan Pasal 4 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.2 Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat dilarang:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian;
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas.

2.2 Perkreditan

2.2.1 Pengertian Kredit

Menurut undang-undang tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan yang diubah dengan undang-undang no.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

2.2.2 Kredit Mikro

Ada banyak pihak yang mencoba mendefinisikan kredit mikro dan beberapa di antaranya adalah Grameen Banking (2003) mendefinisikan kredit mikro sebagai pengembangan pinjaman dalam jumlah kecil kepada pengusaha yang terlalu lemah kualifikasinya untuk dapat mengakses pada pinjaman dari bank tradisional.

Sementara itu definisi kredit mikro menurut Kementerian Koperasi Dan UKM Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK (2006) adalah program/kegiatan memberikan pinjaman yang jumlahnya kecil kepada masyarakat miskin untuk kegiatan usaha meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya (*The World Summit on Microcredit*, 2-4 Februari 1997).

Salah satu kredit usaha mikro yang berkembang di Indonesia adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit Modal Kerja (KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM-K) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin. KUR mensyaratkan bahwa agunan pokok kredit adalah proyek yang dibiayai. Namun karena agunan tambahan yang dimiliki oleh UMKM-K pada umumnya kurang, maka sebagian di-cover dengan program penjaminan. Besarnya *coverage* penjaminan maksimal 70% dari plafon kredit. Sumber dana KUR sepenuhnya berasal dari dana komersial Bank.

2.2.3 Prinsip kredit

Menurut Kasmir (2005) terdapat lima prinsip kredit atau dikenal dengan “prinsip 5C” atau “5C Credit”, yaitu:

1. *Character*

Karakter (*character*) mencakup keinginan calon debitur untuk memenuhi janji atau melunasi kewajiban sesuai jadwal, dalam kondisi baik dan buruk. Dengan demikian dalam unsur karakter tercakup kemampuan membayar dan keinginan membayar.

2. *Capacity*

Kapasitas (*Capacity*) berkaitan dengan kemampuan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan jadwal. Penilaian kemampuan pelunasan berdasarkan analisis financial.

3. *Capital*

Penilaian atas modal (*Capital*) yang dimiliki oleh calon debitur ingin melihat kekuatan permodalan, juga komitmen dalam usaha. Makin besar modal yang

dapat dimiliki makin besar pula kemampuan dan komitmen dalam menjalankan usaha

4. *Collateral*

Jaminan (*Collateral*) amat dibutuhkan oleh bank untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian, bila terjadi hal-hal yang buruk dari usaha yang dikelola nasabah.

5. *Condition*

Kondisi ekonomi adalah lingkungan eksternal perusahaan yang diperkirakan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan usaha

2.2.4 Unsur-unsur Kredit

Berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam kredit (Suyatno et al. 14-2):

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang
- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang
- c. Degree of Risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.a.5 Tujuan Pemberian Kredit

Berikut ini adalah tujuan Pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank (Suyatno et al. 15-3):

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat
- c. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya

2.2.6 Fungsi Kredit

Berikut ini adalah fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan (Suyatno et al. 16-2):

- a) Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang
- b) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c) Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
- e) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
- f) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
- g) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

2.2.7 Jenis-jenis Kredit Perbankan

Berikut ini adalah berbagai macam jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari (Suyatno et al. 25-1):

1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya
 - a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan konsumen, misalnya : pembelian barang-barang elektronik untuk dipakai sendiri, kendaraan bermotor atau mobil yang dipakai untuk sendiri.
 - b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan usaha dan memperlancar jalannya proses

produksi untuk menghasilkan nilai tambah dengan tujuan memperoleh keuntungan baik untuk aktivitas perdagangan, produksi, maupun investasi.

- c. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.
2. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya
 - a. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Contohnya adalah kredit penjualan yaitu kredit yang diberikan oleh penjual kepada pembeli, kredit wesel (*payable notes*), kredit eksploitasi.
 - b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Sebagai contoh kredit untuk membeli bahan baku, upah buruh, dan suku cadang, dan lain-lain.
 - c. Kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dan pendirian proyek baru, rehabilitas, perluasan, dan pendirian proyek lain.
 3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya
 - a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1b.
 - b. Kredit dengan agunan (*secured loan*). agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1c dan pasal 3 SK diatas berupa agunan barang baik barang tetap maupun barang

tidak bergerak, agunan pribadi (*borgtocht*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila terutang (kreditur) tidak menepati kewajibannya, agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang terdaftar (*listed*) di bursa efek-efek.

4. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya

- a. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksudkan disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.
- b. Kredit eksploitasi adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini lazim disebut kredit modal kerja/kredit prosuk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas. Kredit ini berupa pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya-biaya produksi lainnya seperti upah buruh, biaya pengepakan, distribusi, dan sebagainya. Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

2.2.8 Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut ketentuan perbankan dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR bertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif, penggolongan kolektibilitas kredit dibagi menjadi 5 kategori, yaitu:

- a. Kredit Lancar

Kredit dianggap lancar apabila pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari

c. Kredit kurang Lancar

Kredit dianggap kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari

d. Kredit Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari, serta terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

e. Kredit Macet

Kredit dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

2.2.9 Jaminan dan Agunan

Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*). Dalam SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2, telah diatur ketentuan bahwa bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1b.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan pemberian kredit pada pasal 1b, adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

Kredit dengan agunan (*secured loan*). agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1c dan pasal 3 Surat Ketetapan

diatas berupa agunan barang baik barang tetap maupun barang tidak bergerak, agunan pribadi (*borgtocht*) yaitu suatu perjanjian dimana satu pihak (*borg*) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila terutang (kreditur) tidak menepati kewajibannya, agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (*listed*) di bursa efek-efek.

2.3 Pengertian Efektivitas

Sondang P. Siagian (2006) memberikan definisi efektifitas sebagai berikut : “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan“.Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Pengertian efektifitas mengacu pada hubungan antara *outcome* dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan (Agung Rai, 2008).

Sedangkan menurut Hessel Nogi (2008) yang dimaksud dengan efektifitas adalah seberapa jauh sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. (Miller , 1977, p.292)

2.4 Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Ada beberapa definisi pengendalian internal sekarang ini dan salah satunya yaitu definisi pengendalian intern menurut Arens, Elder dan Beasley (2012) bahwa Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen dengan keyakinan memadai bahwa perusahaan mencapai sasaran dan tujuannya. Kebijakan dan prosedur ini sering disebut pengendalian, dan secara kolektif disebut pengendalian intern entitas.

Sedangkan pengendalian internal menurut Hermiyetti (2010) terdiri atas rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan tindakan yang diambil dalam bisnis untuk melindungi aset, memeriksa akurasi dan keandalan akuntansi data, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan (Moller & Witt, 1999). Dengan pengendalian internal yang baik, terjadinya *fraud* dan pemborosan dapat dideteksi dan ditang-gulangi secara dini sehingga kerugian perusahaan dapat dihindari.

Pengendalian internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2011) didefinisikan sebagai suatu proses, dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian sasaran dalam kategori berikut: 1) Efektivitas dan efisiensi operasi. 2) Keandalan pelaporan keuangan. 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Elder et al. (2012) Kerangka pengendalian internal mempunyai lima komponen yang saling terkait : 1) *Control environment*. 2) *Risk Assessment*. 3) *Control activities*. 4) *Information and communication*. 5) *Monitoring*. Perusahaan membutuhkan kelima komponen untuk memastikan kontrol yang kuat atas kegiatan mereka. Sejauh mana setiap komponen yang diimplementasikan dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas dari sebuah perusahaan, jenis industri, filosofi manajemen, dan budaya perusahaan. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponen .

1. *Control Environment*

Control environment merefleksikan keseluruhan perilaku dan kesadaran direksi, komite audit, manajer, pemilik, dan karyawan tentang arti penting dan penekanan pengendalian internal dalam perusahaan. *Control environment* yang lemah seringkali mengindikasikan kelemahan komponen-komponen struktur pengendalian internal lainnya. *Control environment* terdiri dari beberapa faktor berikut:

a. Nilai etika dan kejujuran

Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan oleh manajemen dalam mengurangi dan meredam tindakan

penyelewengan yang dilakukan oleh individu-individu dalam perusahaan karena pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

b. Keinginan untuk maju

Keinginan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian, untuk mendapatkan suatu perbaikan serta pertimbangan manajemen terhadap kecakapan seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dan bagaimana tingkat kecakapannya diterjemahkan ke dalam keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.

c. Dewan direksi dan komite audit

Suatu kesatuan pengendalian dipengaruhi oleh dewan direksi atau komite audit. Komite audit diberikan tanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang mencakup pengendalian internal, ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan agar menjadi efektif dan memelihara komunikasi yang berkesinambungan secara baik dengan auditor eksternal maupun auditor internal.

d. Falsafah manajemen dan gaya operasi

Melalui kebijakan dan aktivitasnya, manajemen memberikan tanda yang jelas terhadap falsafah manajemen dan gaya operasi tentang pentingnya pengendalian internal. Jika manajemen percaya bahwa pengendalian itu penting, manajemen akan memastikan bahwa kebijakan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif.

e. Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan pola otoritas dan tanggung jawab yang ada dalam organisasi serta garis pelaporan yang jelas. Kesatuan struktur organisasi menyediakan kerangka kerja operasi untuk mencapai keseluruhan tujuan perusahaan yang telah direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan diawasi.

f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah proses operasi, proses pelaporan, dan memperjelas

tingkat kepemimpinan dalam perusahaan. Didalamnya termasuk kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha, pengetahuan, dan pengalaman tokoh-tokoh kunci dalam perusahaan dan sumber daya yang tersedia untuk menjalankan operasi perusahaan serta terdapat dokumen tertulis yang mengindikasikan pemberian wewenang dan tanggung jawab tersebut.

g. Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia

Kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia berhubungan dengan proses penerimaan, penempatan, pelatihan, evaluasi, konseling, promosi dan penggantian karena sumber daya manusia merupakan komponen kunci dalam suatu pengendalian

2. *Risk Assessment*

Penilaian risiko untuk laporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan oleh manajemen yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan dan kesesuaian sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini melibatkan identifikasi dan analisa resiko-resiko yang relevan yang dapat mencegah pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan unit-unit organisasi dan formasi rencana untuk menentukan bagaimana mengelola resiko-resiko tersebut.

3. *Control Activities*

Control activities adalah kebijakan dan prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk menghadapi resiko-resiko yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. *Control activie* dapat dikategorikan dalam berbagai aktivitas diantaranya:

a. Adequate separation of duties

Tujuan utama pemisahan tugas ini adalah mencegah dan agar dapat dilakukannya deteksi segera atas kesalahan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada seseorang. Pembagian tugas dalam suatu organisasi di dasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a) Pemisahan fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi,

- b) Pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi penyimpanan,
- c) Pemisahan fungsi otorisasi dan fungsi akuntansi,
- d) Pemisahan fungsi dalam pengelolaan data elektronik.

b. Proper authorization of transaction and activities

Tujuan dari otorisasi transaksi adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang diproses oleh sistem informasi valid dan sesuai dengan tujuan pihak manajemen. Dalam organisasi, otorisasi untuk setiap transaksi hanya dapat diberikan oleh orang yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Orang atau kelompok yang menjamin otorisasi khusus untuk suatu transaksi seharusnya memegang posisi yang sepadan dengan sifat dan besarnya transaksi.

c. Adequate documents and records

Catatan akuntansi (*accounting record*) suatu perusahaan terdiri dari dokumen sumber, jurnal dan buku besar. Dokumen dan catatan adalah objek fisik dimana transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan dalam sebuah dokumen yang disebut dengan formulir. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang dalam memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam organisasi . oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Prinsip-prinsip relevan tertentu yang harus diikuti dalam membuat rancangan dan penggunaan catatan dan dokumen yang pantas yaitu bahwa dokumen dan catatan sebaiknya:

- a) Berseri dan *prenumbered* untuk memungkinkan pengendalian atas hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu dalam penempatan dokumen,
- b) Disiapkan pada saat transaksi terjadi dan sesudahnya,
- c) Cukup sederhana untuk menjamin bahwa dokumen dan catatan dapat dimengerti dengan jelas,
- d) Dirancang sedapat mungkin untuk multiguna sehingga meminimalkan bentuk dokumen dan catatan yang berbeda-beda,

e) Dirancang dalam bentuk yang mendorong penyajian yang benar yaitu dengan memasukkan unsur pengecekan intern dalam formulir dan catatan”.

d. Physical control over assets and records.

Tujuan *physical control over assets and records*. adalah untuk mempertahankan pengendalian internal yang memadai sehingga aset dan catatan harus dilindungi. Jika aset dibiarkan tidak terlindungi, maka aset tersebut dapat dicuri. Sedangkan jika catatan tidak dilindungi secara memadai, mereka dapat dicuri, rusak, diubah, atau hilang, yang mana akan sangat mengganggu proses akuntansi dan operasi bisnis. Ketika perusahaan sudah sangat terkomputerisasi maka peralatan komputer, program, dan file data harus dilindungi. File data adalah catatan perusahaan dan, jika rusak, bisa mahal atau bahkan tidak mungkin untuk direkonstruksi.

e. Independent checks on performance

Kategori terakhir dari kegiatan pengendalian adalah penelaahan secara cermat dan berkesinambungan dari empat lainnya, sering disebut pemeriksaan independen atau verifikasi internal. kebutuhan untuk pemeriksaan independen muncul karena kontrol internal cenderung berubah dari waktu ke waktu, kecuali ada tinjauan sering. personil cenderung forgetthey dapat menjadi careless kecuali seseorang mengamati dan mengevaluasi kinerja pewartis. regardless kualitas kontrol, personil dapat membuat kesalahan atau melakukan penipuan.

4. Information and Communication

Tujuan dari informasi akuntansi suatu entitas dan sistem komunikasi adalah untuk memulai, merekam, memproses, dan melaporkan transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas atas aktiva yang bersangkutan. Informasi harus diidentifikasi, diproses, dan dikomunikasikan sehingga personil yang tepat dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Sebuah sistem informasi yang tepat berfungsi membantu memastikan bahwa tanggung jawab telah tercapai.

5. *Monitoring*

Kegiatan monitoring berhubungan dengan penilaian berkelanjutan atau berkala terhadap kualitas pengendalian internal dengan manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian beroperasi sebagaimana dimaksud dan bahwa mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian pada kegiatan pengendalian, laporan oleh regulator seperti instansi perbankan peraturan, umpan balik dari personil operasi, dan keluhan dari pelanggan tentang perubahan tagihan.

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal

Alasan dibentuknya suatu pengendalian intern adalah untuk membantu tercapainya tujuan perusahaan secara menyeluruh, dan ini ditegaskan juga oleh Arens, Elder dan Beasley (2012) bahwa manajemen memiliki 3 tujuan dalam membuat sistem internal control yang efektif, yaitu:

- a. Keandalan Pelaporan Keuangan (*Reliability of financial reporting*)
- b. Efisiensi dan efektivitas operasi (*Efficiency and effectiveness of operations*)
- c. Ketaatan pada hukum dan peraturan (*Compliance with laws and regulations*)

Penjelasan mengenai 3 (tiga) tujuan pengendalian intern yang diungkapkan oleh Arens, Elder dan Beasley akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Keandalan Pelaporan Keuangan (*Reliability of financial reporting*)

Laporan keuangan yang telah disajikan oleh manajemen tidak hanya digunakan oleh pihak manajemen tetapi juga oleh pihak-pihak diluar perusahaan. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

- b) Efisiensi dan efektivitas operasi (*Efficiency and effectiveness of operations*)

Pengendalian dalam suatu perusahaan hendaknya mendorong usaha penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Beberapa bagian penting dari pengendalian ini adalah penyediaan informasi yang akurat untuk para pembuat keputusan intern, usaha melindungi asset, dokumen dan catatan yang ada.

c) Ketaatan pada hukum dan peraturan (*Compliance with laws and regulations*)

Setiap perusahaan pada umumnya wajib menaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan pengendalian intern yang baik agar aktivitas perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan pemerintah

Fungsi pengendalian internal dapat membantu entitas mencapai kinerja dan target keuntungan, dan mencegah hilangnya sumber daya. Hal ini dapat membantu memastikan pelaporan keuangan dapat diandalkan. Dan juga dapat membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menghindari rusaknya reputasi dan konsekuensi lainnya.

2.5 Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.05/22/DPNP tanggal 29 september 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, komponen pengendalian intern dalam perbankan meliputi:

1. *Management Oversight and Control Culture* (Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian)

Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak-pihak yang terkait pada manajemen PT. BPR Bandung Kidul karena berperan penting dalam kegiatan operasional Bank untuk memastikan kegiatan Bank sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku sehingga dapat

membantu dalam tercapainya rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan serta tercapainya tujuan perusahaan.

2. *Risk Recognition and Assessment* (Identifikasi dan penilaian resiko)

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain:

- a. Perubahan kegiatan operasional bank
- b. Perubahan susunan personalia
- c. Perubahan sistem informasi
- d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu
- e. Perkembangan teknologi
- f. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku

3. *Control Activities and Segregation of Duties* (Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi)\

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

4. *Accountancy, Information and Communication* (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi)

Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi yang terjadi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang Bank. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi yang terjadi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Sistem

akuntansi ini dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit.

5. *Monitoring Activities and Correcting Deficiencies* (Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan)

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Kemudian Bank juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal. Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sehat. Selanjutnya prinsip-prinsip keputusan kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan, penerapan 5C (karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi) demi terwujudnya pemberian kredit yang efektif.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Profil

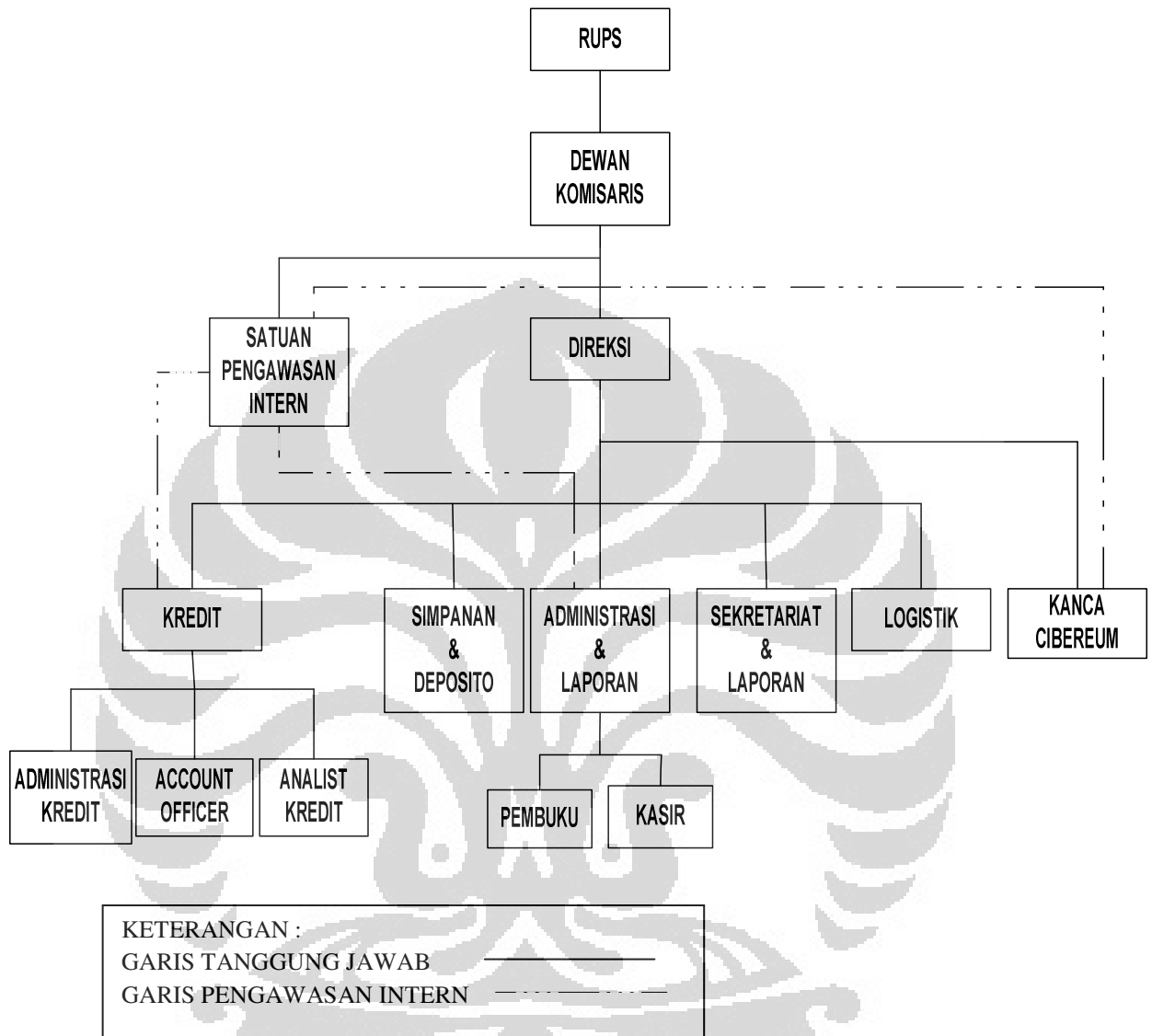
Didirikannya PT. BPR Bandung Kidul merupakan kepedulian dari pengurus KPBS dan tokoh masyarakat di pangalengan terhadap para peternak sapi, sebab untuk mengembangkan usaha para peternak agar lebih maju maka dinilai perlu adanya suatu jasa perbankan.

Pada akhir bulan Desember 1992 yang terdiri dari Drs.H. Daman Danuwijaya, H.Engkum Maskun dan H. Aman Sulaeman sepakat untuk mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya ketiga tokoh tersebut menghubungi staf BRI, yaitu Sosja Sondjaja,BA. Dan W.Hermansyah yang bertugas untuk mengurus atau menyelesaikan pendirian bank yang dimaksud tersebut.

Sehubungan dengan nama itu telah ada, maka atas persetujuan Menteri Kehakiman RI No.02.621HT.01.01/1994 Bank tersebut dirubah namanya menjadi Bank Perkreditan Rakyat Bandung Kidul atau disingkat BPRBK, dan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep/270/KM.17/1993 tanggal 24 November 1993 BPR Bandung Kidul mendapat izin usaha untuk pelaksanaan operasional.

Pada tanggal 3 Januari 1994 mulai dioperasikannya PT. BPR Bandung Kidul untuk melaksanakan operasional Perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dalam melayani kebutuhan dana yang berbentuk kredit kepada peternak anggota KPBS dan masyarakat pada umumnya, serta menghimpun dana dalam bentuk Tabungan dan deposito.

3.2 Struktur Organisasi

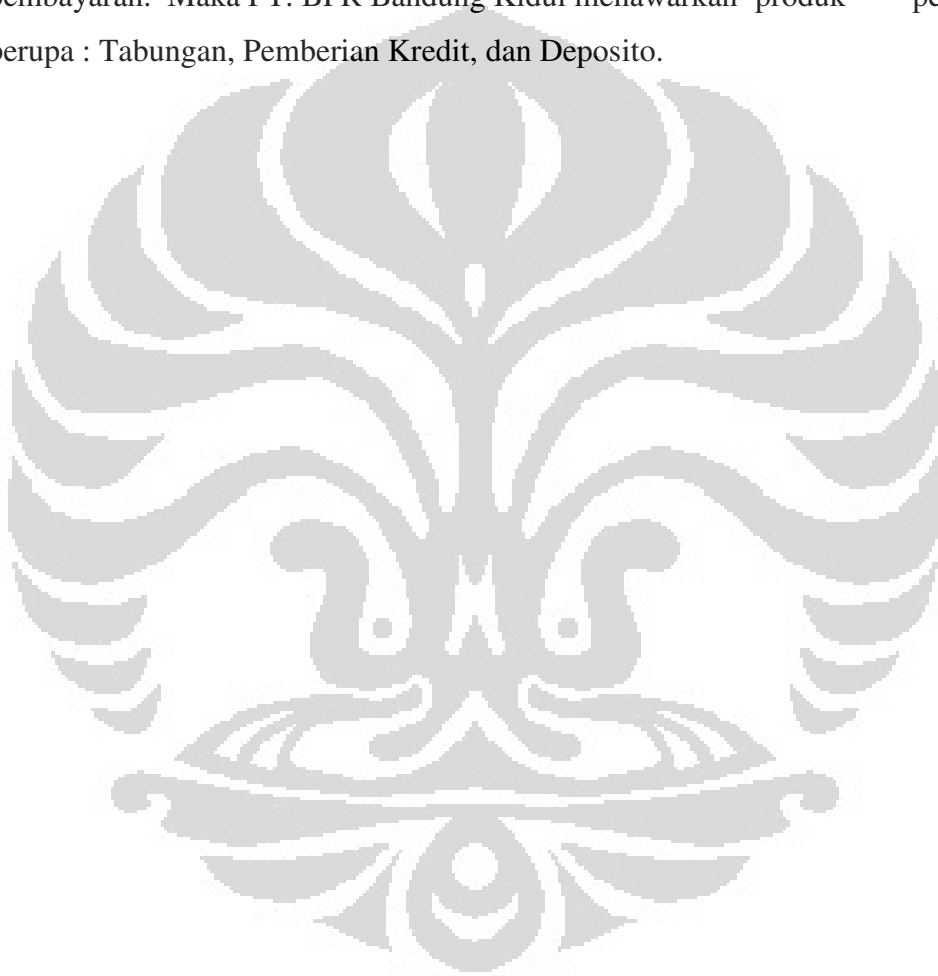


Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber : telah diolah kembali

3.3 Produk yang Ditawarkan

Menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh regulator perbankan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia mengenai Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka PT. BPR Bandung Kidul menawarkan produk perbankan berupa : Tabungan, Pemberian Kredit, dan Deposito.



BAB 4

ANALISA PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PEMBERIAN KREDIT MIKRO YANG EFEKTIF (STUDI KASUS PADA PT. BPR BANDUNG KIDUL)

4.1 Pengendalian Internal Pemberian Kredit

PT. BPR Bandung Kidul meyakini bahwa agar tercapainya pemberian kredit yang tepat guna dan tepat sasaran maka dibutuhkan pengendalian internal pemberian kredit yang bagus sehingga dapat meminimalkan resiko yang terkandung didalam setiap pemberian kredit.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manajemen PT. BPR Bandung Kidul maka komponen dari sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT. BPR Bandung Kidul dalam proses pemberian kredit seperti yang tertera didalam Surat Edaran BI No.05/22/DPNP tanggal 29 September 2003 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Management Oversight and Control Culture (Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian)

- a) Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak-pihak yang terkait pada manajemen PT. BPR Bandung Kidul karena berperan penting dalam kegiatan operasional Bank untuk memastikan kegiatan Bank sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku sehingga dapat membantu dalam tercapainya rencana kerja anggaran yang telah ditetapkan serta tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Manajemen menaruh perhatian yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan, ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang terjalin antara manajemen dan karyawan yang mengingatkan tentang pentingnya profesionalisme serta efektivitas pelaksanaan tugas kepada karyawan. Pengawasan oleh manajemen sangat penting

dilakukan untuk memastikan prosedur serta kebijakan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik serta komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan akan meningkatkan motivasi bagi karyawan karena merasa diperhatikan sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif sehingga akan meningkatkan produktifitas karyawan.

- c) Setiap akhir bulan Bank melakukan evaluasi terkait kinerja karyawannya pada umumnya dan juga kinerja karyawan dalam hal pemberian kredit pada khususnya untuk menilai dan menemukan masalah yang terjadi dalam proses pemberian kredit sehingga bisa segera ditemukan solusinya agar tidak dapat mengganggu kinerja kegiatan operasional Bank. Dan setiap 6 bulan sekali Bank melakukan evaluasi terkait kegiatan operasionalnya untuk memastikan dipatuhinya kebijakan dan prosedur atas semua transaksi yang terjadi. Dan juga untuk menemukan kelemahan atas sistem pengendalian intern terkait pemberian kredit untuk dapat segera diperbaiki sehingga tidak akan mengganggu kegiatan operasional Bank.
- d) PT. BPR Bandung Kidul mempunyai program untuk meningkatkan kualitas karyawannya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait dengan jabatan karyawan tersebut. Serta sejalan dengan peraturan perbankan yang selalu berubah maka Bank selalu menyesuaikan dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan serta manajemen agar dapat mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai perubahan peraturan yang berlaku.

b. Risk Recognition and Assessment (Identifikasi dan penilaian resiko)

- a) Penilaian risiko sangat penting dilakukan dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Risiko yang diidentifikasi oleh PT. BPR Bandung Kidul yang pertama adalah apabila petugas administrasi kredit salah memberikan informasi kepada calon debitur sehingga mereka akan enggan untuk menggunakan jasa Bank dan

lebih memilih untuk dapat menggunakan jasa dari Bank pesaing sehingga akan merugikan Bank.

- b) Risiko yang kedua adalah *Account Officer* (AO) memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit.
- c) Risiko yang ketiga adalah Kabag Kredit memberikan keputusan pemberian kredit berdasarkan penilaian subjektif bukan berdasarkan penilaian yang objektif sehingga dikhawatirkan terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur.
- d) Risiko yang keempat adalah perubahan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi berkembangnya usaha dari nasabah sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pengembalian pinjaman kredit.apabila kondisi ekonomi masyarakat sedang bagus maka nasabah tidak mengalami kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya malah mungkin masyarakat dapat melunasi pinjaman kreditnya lebih cepat daripada waktu yang telah disepakati. Sebaliknya .apabila kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak bagus maka nasabah tidak akan mengalami kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya malah mungkin masyarakat tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya.
- e) Resiko yang kelima adalah debitur memiliki pemahaman yang lemah terkait pentingnya perjanjian kredit sehingga ada saja debitur yang tidak menepati perjanjian kredit yang telah dibuat dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu sehingga dapat mengakibatkan kredit macet.

c. *Control Activities and Segregation of Duties* (Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi)

- a) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan intern untuk menghindari adanya pemberian kredit yang tidak sehat seperti tidak adanya surat kepemilikan atas agunan, surat kepemilikan atas agunan tidak asli,

atau adanya pemberian kredit fiktif, dan lain-lain, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya kredit macet.

- b) Bank melaksanakan pengendalian terhadap sistem informasi dalam bentuk elektronik yaitu dengan cara memberikan *password* yang berbeda untuk setiap jenis kegiatan yang berbeda contohnya karyawan Bagian simpanan mempunyai *password* berbeda dengan *password* yang dimiliki oleh karyawan bagian kredit sehingga tidak semua karyawan dapat mengakses setiap *database* sehingga data yang ada dapat terjaga keamanannya
- c) Kegiatan operasional Bank sangat ditunjang oleh aset fisik sehingga memungkinkan Bank untuk dapat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu PT.BPR Bandung Kidul melakukan pengendalian aset fisik agar kegiatan operasional Bank tidak mendapatkan gangguan. Pengendalian aset fisik yang dilakukan antara lain adalah dengan mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dan mengumpulkannya dalam suatu tempat sehingga menjadi suatu file khusus seperti file tentang data nasabah kredit, kemudian Bank juga memberikan akses yang terbatas kepada pegawai tertentu untuk dapat mengakses data yang terdapat didalam database komputer Bank sehingga meminimalkan data rahasia perusahaan tidak bocor keluar. Bank juga mempunyai ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen penting yang dibuat dengan rangka baja dan didesain tahan api dan tahan gempa sehingga dokumen tersebut terjaga keamanannya. Bank juga memiliki satuan pengamanan untuk mengamankan aset fisik berupa gedung.
- d) Bank mempunyai dokumen tentang dengan kebijakan, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku terkait dengan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku umum.
- e) Bank melakukan pemisahan tugas yang jelas untuk menghindari adanya benturan kepentingan didalam pengambilan keputusan

khususnya pada proses pemberian kredit sehingga menghindari adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Bank memisahkan fungsi antara *Account Officer* dengan Petugas Administrasi Kredit untuk menghindari adanya *conflict of interest* dari karyawan sehingga proses penerimaan permohonan pemberian kredit yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Bank juga memisahkan fungsi antara pembuku dengan kasir untuk menghindari adanya *conflict of interest* yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya transaksi palsu, pengelapan dana, dan sebagainya.

d. Accountancy, Information and Communication (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi)

- a) Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengelompokkan, mencatat, dan melaporkan transaksi yang terjadi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang Bank. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi yang terjadi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk mencegah salah saji dalam laporan keuangan. Sistem akuntansi ini dimulai dari pencatatan kredit pada waktu pemberian kredit, penyetoran-penyetoran, dan pembayaran bunga sampai pada pelunasan kredit.
- b) PT. BPR Bandung Kidul melaksanakan proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen secara berkala untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku. Setiap penyimpangan yang terjadi segera diinvestigasi dan dicarikan solusi atas permasalahannya.
- c) Informasi dan komunikasi penting untuk merealisasikan semua tujuan sistem pengendalian intern. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan dan memelihara informasi keuangan dan non-

keuangan yang dapat dipercaya dan relevan serta mengkomunikasikan informasi ini dengan pengungkapan yang wajar dalam laporan yang tepat waktu, terkini, dan akurat.

- d) Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas, pedoman kebijakan, dan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan.

e. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies (Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan)

- a) Bank selalu memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern sehingga sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh Bank telah sejalan dengan kondisi kegiatan operasional Bank dan juga kondisi yang terjadi dimasyarakat.
- b) Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai. PT. BPR Bandung Kidul melakukan evaluasi terhadap para karyawannya setiap akhir bulan, setiap karyawan akan dievaluasi oleh masing-masing kepala bagian, sedangkan untuk manajemen akan dievaluasi oleh RUPS setiap akhir tahun
- c) Direktur serta Direktur Utama bergantian bertugas memantau kegiatan operasional di cabang dua hari dalam seminggu untuk memastikan kegiatan operasional dicabang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.
- d) SPI menganalisis data operasional dan melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran.
- e) Bank telah menetapkan satuan pengawasan intern yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan pengendalian intern serta efektivitasnya.

- f) Bank melakukan evaluasi pengendalian internnya sekurang-kurangnya setahun sekali atau paling cepat setiap enam bulan sekali yang dilaksanakan oleh manajemen dengan cara menganalisis laporan pengawasan pengendalian intern yang telah dibuat oleh satuan pengawas intern. Apabila terjadi penyimpangan maka akan diteliti darimana asal penyimpangan tersebut, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan, dan alasan sampai penyimpangan tersebut terjadi.

4.2 Pemberian Kredit Mikro

4.2.1 Pedoman Pemberian Kredit Mikro

Berikut adalah prosedur yang harus dilalui dalam proses pemberian kredit:

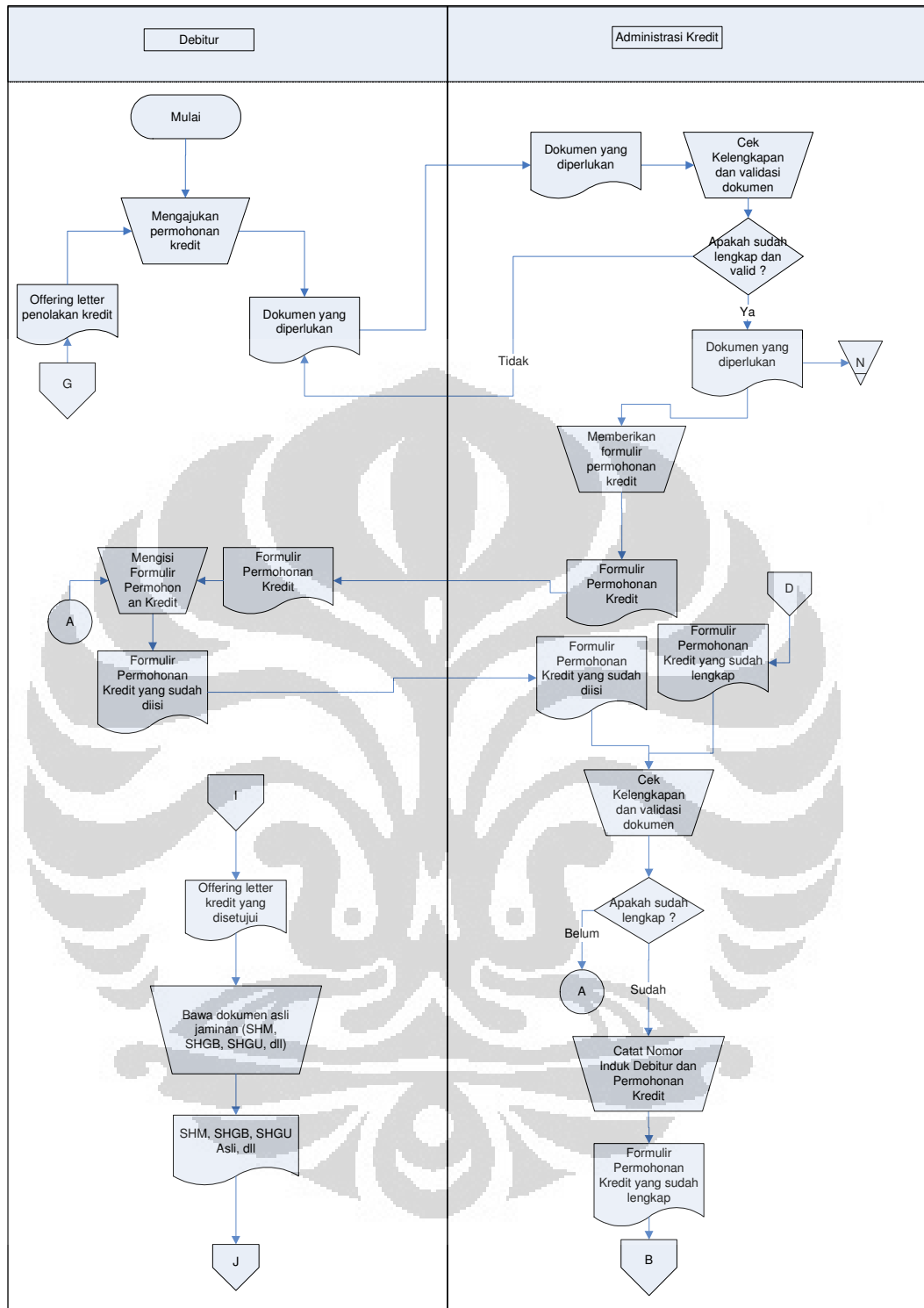
- a. Proses permohonan kredit dimulai ketika calon debitur mendatangi petugas administrasi kredit untuk mengajukan permohonan kredit dengan membawa kartu identitas (KTP, dan SIM), identitas usaha (SIUP, dan TDP), dan juga bukti kepemilikan agunan (SHM, SHGB, SHGU, dll). Kemudian akan diberikan formulir permohonan kredit untuk diisi secara lengkap dan benar.
- b. Kemudian petugas administrasi kredit akan mencatat permohonan kredit tersebut kedalam registrasi permohonan kredit serta registrasi nomor induk debitur sehingga data aktivitas pemberian kredit akan selalu terbaharui. Setelah itu permohonan kredit tersebut akan diberikan kepada Direksi dan segera diserahkan kepada AO untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara *on the spot* untuk menganalisa kelayakan serta meninjau keabsahan data yang diisi oleh calon debitur ketika mengisi formulir untuk menghindari pemberian kredit kepada calon debitur yang kurang atau tidak layak. Dan setelah itu permohonan kredit akan dianalisa dan diputuskan oleh Komite Kredit.
- c. Setelah itu petugas administrasi kredit akan membuat surat penawaran (*offering letter*) kepada calon debitur yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan calon debitur telah mendapat persetujuan atau penolakan yang kemudian akan ditandatangani diatas materai dan menyerahkan

semua dokumen asli jaminan, kemudian dokumen tersebut akan diteliti keabsahannya oleh petugas administrasi kredit.

- d. Tahap selanjutnya adalah pengikatan kredit yang dipersiapkan oleh petugas administrasi kredit, setelah itu diikuti dengan pengikatan jaminan maupun pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Kuasa Menjual (SKM). Dalam tahap ini akan diteliti kembali keabsahan dokumen terkait yang diperlukan dan meyakini bahwa orang yang menandatangani akad kredit maupun SKMHT/SKM adalah benar-benar orang yang sah legalitasnya. Setelah pengikatan kredit dan jaminan dilaksanakan maka bagian administrasi kredit segera membuat Kwitansi pembayaran untuk mengaktifkan pinjaman yang diserahkan kepada bagian operasional sebagai dasar dilakukan pencairan kredit. Kwitansi pembayaran ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Direksi/Pimpinan Cabang)
- e. Berdasarkan Kwitansi pembayaran kasir melakukan pencairan kredit kepada debitur dengan terlebih dahulu meneliti dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan kwitansi untuk menghindari terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. Kemudian kasir juga kembali menjelaskan perincian uang yang diterima debitur dan syarat-syarat kredit secara singkat terutama kewajiban pembayaran kembali angsurannya.
- f. Setelah tahap realisasi maka petugas lapangan (AO) maupun petugas administrasi pinjaman harus memonitor penerimaan angsuran kredit pokok dan bunganya. Administrasi pinjaman membuat daftar angsuran yang harus ditagih dalam bulan yang bersangkutan dan disampaikan kepada petugas lapangan (AO) yang kemudian harus diberitahukan kepada debitur agar membayar sesuai tanggal dan jumlah kewajiban angsuran. Bila sampai tanggal angsuran ternyata debitur belum melakukan pembayaran maka petugas lapangan (AO) mendatangi/ menghubungi debitur agar segera memenuhi kewajibannya.
- g. Apabila terdapat kredit yang mulai tersendat pengembaliannya maka PT. BPR. Bandung Kidul akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Peringatan lisan diberikan kepada debitur dengan cara mendatangi

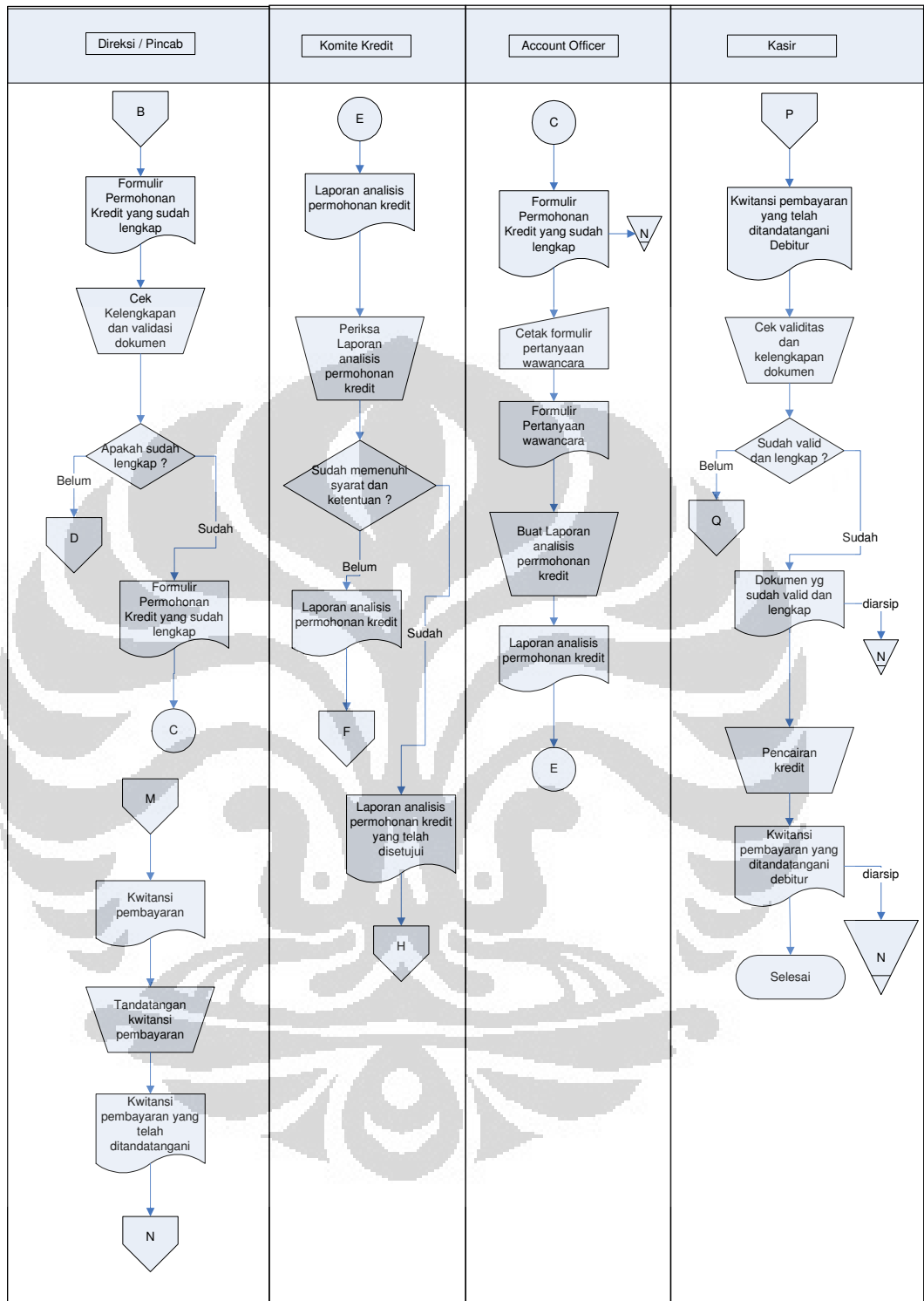
debitur dan diberikan tenggat waktu selama 1 bulan untuk melunasi. Kemudian peringatan tertulis diberikan bagi debitur yang telah mendapatkan peringatan lisan selama 3 kali namun belum memenuhi kewajibannya. Peringatan tertulis diberikan dalam 3 tahapan berupa :

1. SP I, yang berisi peringatan agar debitur segera memenuhi kewajibannya.
 2. SP II, yang berisikan peringatan disertai limit waktu penyelesaian serta sanksi bila tidak dipenuhi
 3. SP III, berisi peringatan terakhir dengan konsekuensi/ancaman akan diambil tindakan eksekusi, bila debitur tetap belum memenuhi kewajibannya.
- h. Kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek baik untuk diselesaikan oleh debitur, dapat ditempuh tahap penyelesaian melalui Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) yang meliputi perubahan grace period, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu dan perubahan jumlah angsuran.
- i. Kemudian apabila setelah dilakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) akan tetapi nasabah tersebut masih mendapatkan kesulitan dalam pengembalian dana pinjamannya tersebut maka Bank akan menawarkan *Reconditioning* yang meliputi *Reschedulling* dan atau penurunan suku bunga, dan juga keringanan penalty.
- j. Apabila setelah dilakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) akan tetapi nasabah tersebut masih mendapatkan kesulitan dalam pengembalian dana pinjamannya tersebut maka Bank akan menawarkan *Restructuring* yang meliputi *Reschedulling*, *Reconditioning*, dan atau penambahan kredit, perubahan jenis fasilitas.
- k. Akan tetapi apabila langkah diatas masih tidak membuahkan hasil dan nasabah tersebut masih kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya maka jalan yang terakhir yang akan ditempuh oleh PT. BPR Bandung Kidul adalah melakukan Penyitaan terhadap Aset Agunan/ eksekusi sehingga akan menyelamatkan dana Pihak ketiga yang digunakan oleh Bank dalam kegiatan pemberian kreditnya yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah.



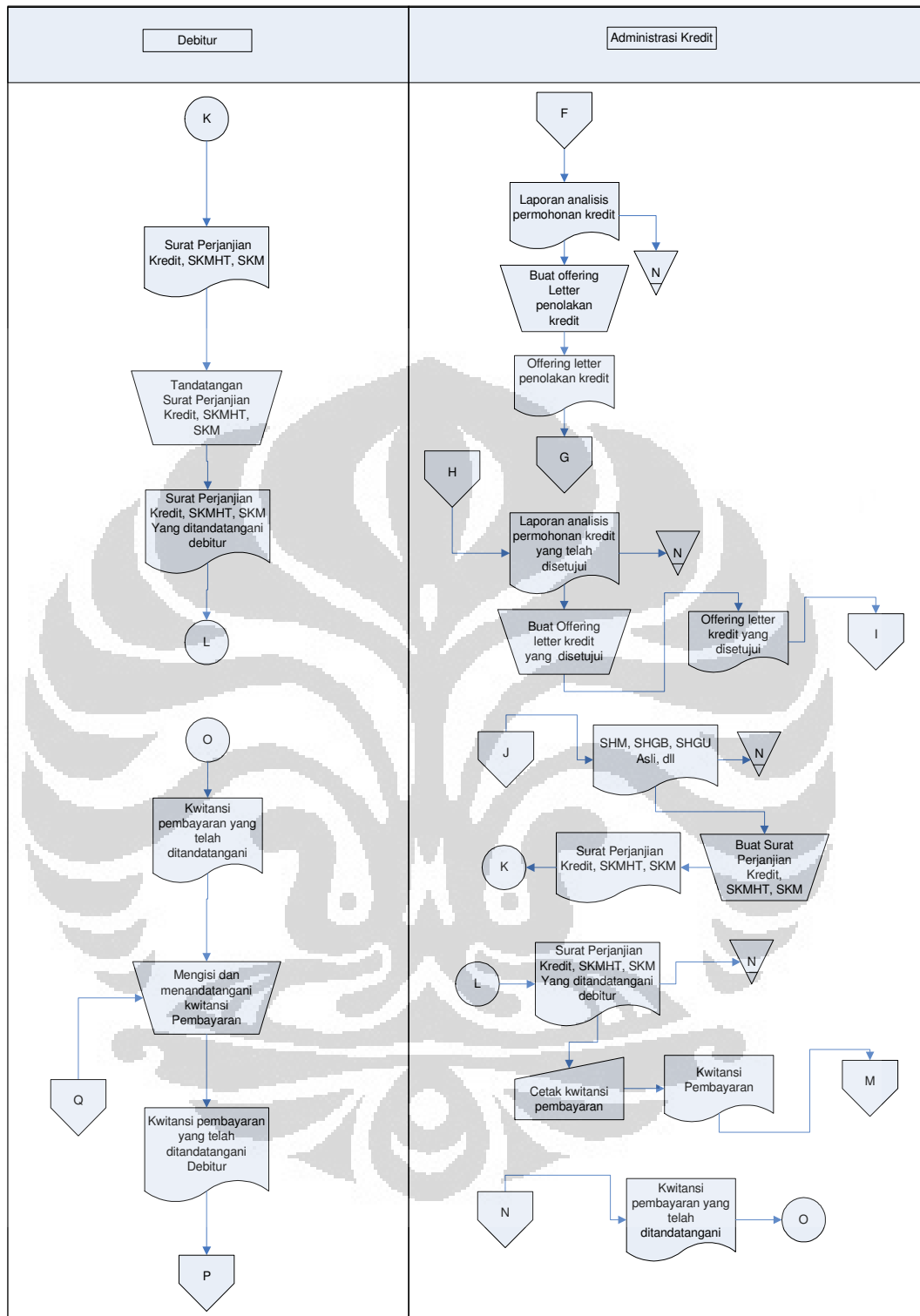
Gambar 4.1 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit

Sumber : Diolah oleh penulis



Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Lanjutan

Sumber : Diolah oleh penulis



Gambar 4.3 Flowchart Prosedur Pemberian Kredit Lanjutan

Sumber : Diolah oleh penulis

4.2.2 Pelaksanaan Pemberian Kredit Mikro

Berikut adalah prosedur yang harus dilalui dalam proses pemberian kredit:

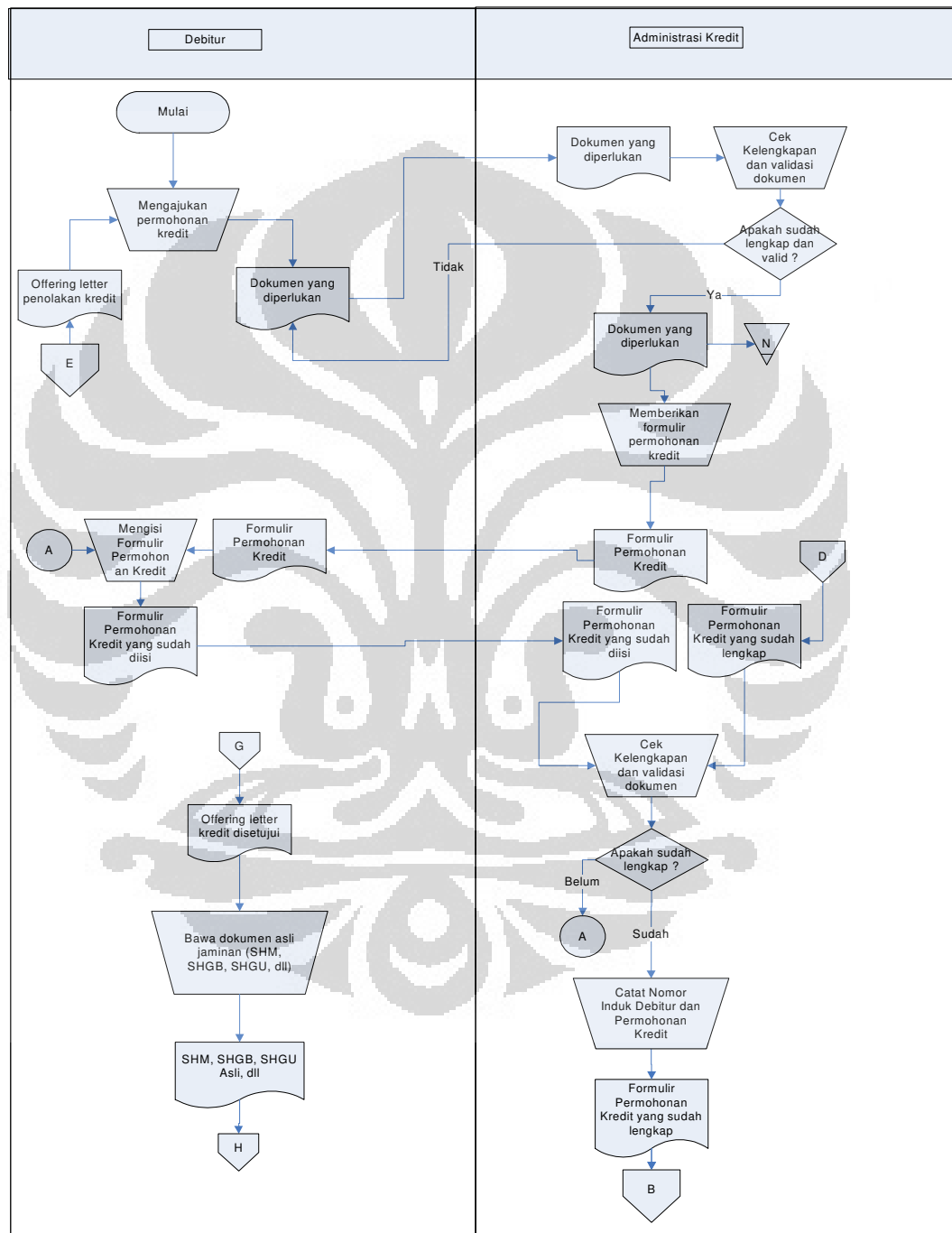
- a. Proses permohonan kredit dimulai ketika calon debitur mendatangi petugas administrasi kredit untuk mengajukan permohonan dengan membawa kartu identitas (KTP, dan SIM), identitas usaha (SIUP, dan TDP), dan juga bukti kepemilikan agunan (SHM, SHGB, SHGU, dll). Kemudian akan diberikan formulir permohonan kredit untuk diisi secara lengkap dan benar.
- b. Kemudian petugas administrasi kredit akan mencatat permohonan kredit tersebut kedalam registrasi permohonan kredit serta registrasi nomor induk debitur sehingga data aktivitas pemberian kredit akan selalu terbaharui. Setelah itu permohonan kredit tersebut akan diberikan kepada Direksi dan segera diserahkan kepada AO untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara *on the spot* untuk menganalisa kelayakan serta meninjau keabsahan data yang diisi oleh calon debitur ketika mengisi formulir untuk menghindari pemberian kredit kepada calon debitur yang kurang atau tidak layak. Dan setelah itu permohonan kredit akan dianalisa dan diputuskan oleh Komite Kredit.
- c. Setelah itu petugas administrasi kredit akan membuat surat penawaran (*offering letter*) kepada calon debitur yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan calon debitur telah mendapat persetujuan atau penolakan yang kemudian akan ditandatangani diatas materai dan menyerahkan semua dokumen asli jaminan, kemudian dokumen tersebut akan diteliti keabsahannya oleh petugas administrasi kredit.
- d. Tahap selanjutnya adalah pengikatan kredit yang dipersiapkan oleh petugas administrasi kredit, setelah itu diikuti dengan pengikatan jaminan maupun pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Surat Kuasa Menjual (SKM). Dalam tahap ini akan diteliti kembali keabsahan dokumen terkait yang diperlukan dan meyakini bahwa orang yang menandatangani akad kredit maupun SKMHT/SKM adalah benar-benar orang yang sah legalitasnya. Setelah pengikatan kredit dan jaminan dilaksanakan maka bagian administrasi kredit segera membuat

Kwitansi pembayaran untuk mengaktifkan pinjaman yang diserahkan kepada bagian operasional sebagai dasar dilakukan pencairan kredit. Kwitansi pembayaran ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Direksi/Pimpinan Cabang).

- e. Berdasarkan Kwitansi pembayaran kasir melakukan pencairan kredit kepada debitur dengan terlebih dahulu meneliti dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan kwitansi untuk menghindari terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. Kemudian kasir juga kembali menjelaskan perincian uang yang diterima debitur dan syarat-syarat kredit secara singkat terutama kewajiban pembayaran kembali angsurannya. Kemudian bagian administrasi kredit segera menyelesaikan administrasi yaitu pengisian register, pengisian register permohonan kredit, serta register lain sehubungan dengan pelaporan kredit.
- f. Setelah tahap realisasi maka petugas lapangan (AO) maupun petugas administrasi pinjaman harus memonitor penerimaan angsuran kredit pokok dan bunganya. Administrasi pinjaman membuat daftar angsuran yang harus ditagih dalam bulan yang bersangkutan dan disampaikan kepada petugas lapangan (AO) yang kemudian harus diberitahukan kepada debitur agar membayar sesuai tanggal dan jumlah kewajiban angsuran. Bila sampai tanggal angsuran ternyata debitur belum melakukan pembayaran maka petugas lapangan (AO) mendatangi/ menghubungi debitur agar segera memenuhi kewajibannya.
- g. Apabila terdapat kredit yang mulai tersendat pengembaliannya maka PT. BPR. Bandung Kidul akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Peringatan lisan diberikan kepada debitur dengan cara mendatangi debitur dan diberikan tenggat waktu sesuai analisis petugas lapangan untuk melunasi yang biasanya diberi waktu antara 1 minggu sampai 1 bulan untuk melakukan pembayaran. Kemudian peringatan tertulis diberikan bagi debitur yang telah mendapatkan peringatan lisan namun belum memenuhi kewajibannya. Peringatan tertulis diberikan dalam 3 tahapan berupa :

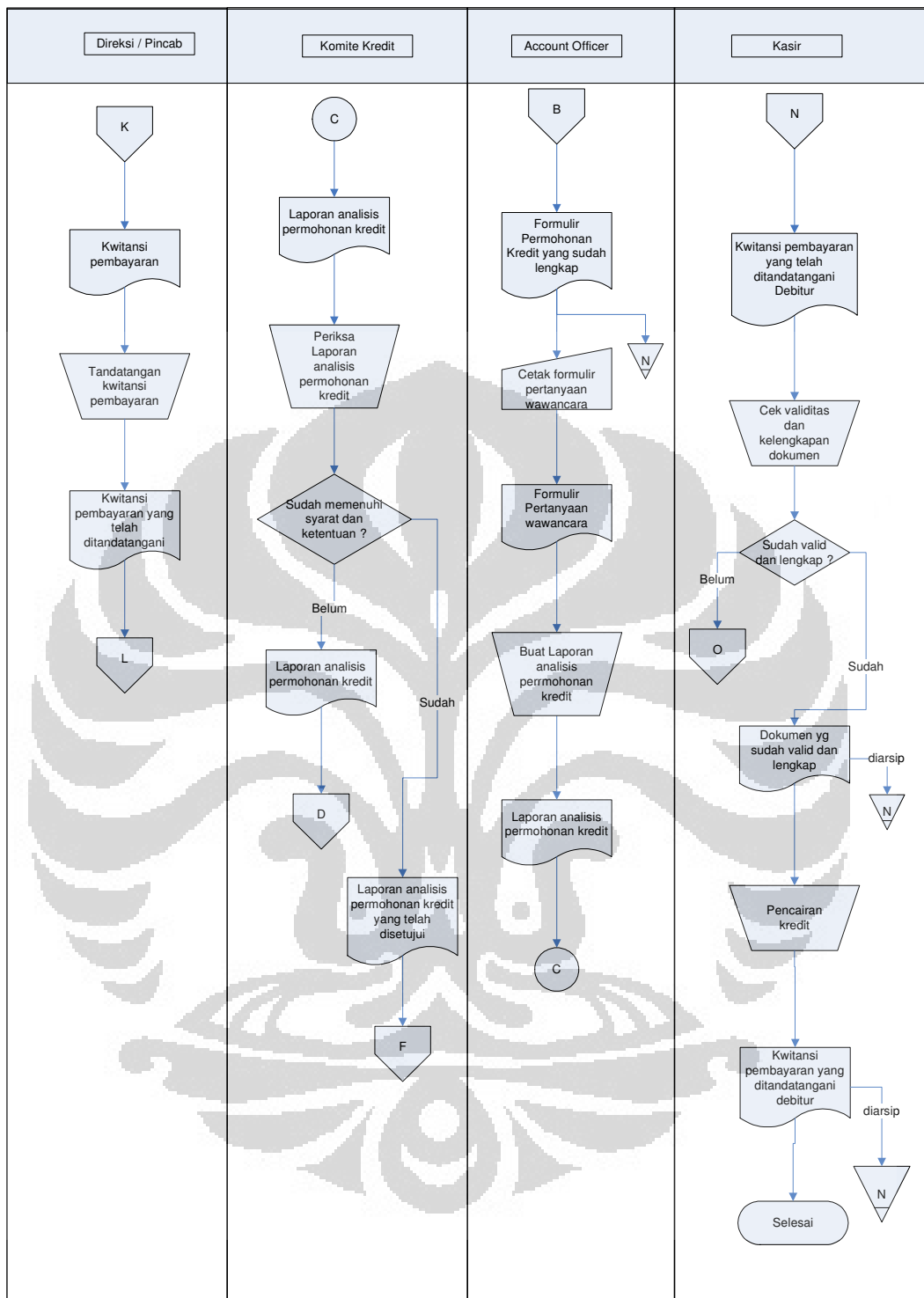
1. SP I, yang berisi peringatan agar debitur segera memenuhi kewajibannya
 2. SP II, yang berisikan peringatan disertai limit waktu penyelesaian serta sanksi bila tidak dipenuhi
 3. SP III, berisi peringatan terakhir dengan konsekuensi/ancaman akan diambil tindakan eksekusi, bila debitur tetap belum memenuhi kewajibannya.
- h. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*), karena Bank pernah melakukan Penjadwalan Ulang akan tetapi debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas.
- i. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Reconditioning* karena setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas.
- j. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Restructuring* karena Bank setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan sehingga dikhawatirkan akan menambah beban debitur dalam pembayaran kredit sehingga akan menyebabkan kegagalan dalam pembayaran kredit. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas.
- k. Akan tetapi apabila langkah diatas masih tidak membuahkan hasil dan nasabah tersebut masih kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya maka jalan yang terakhir yang akan ditempuh oleh PT. BPR Bandung

Kidul adalah melakukan Penyitaan terhadap Aset Agunan/ eksekusi sehingga akan menyelamatkan dana Pihak ketiga yang digunakan oleh Bank dalam kegiatan pemberian kreditnya yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah.



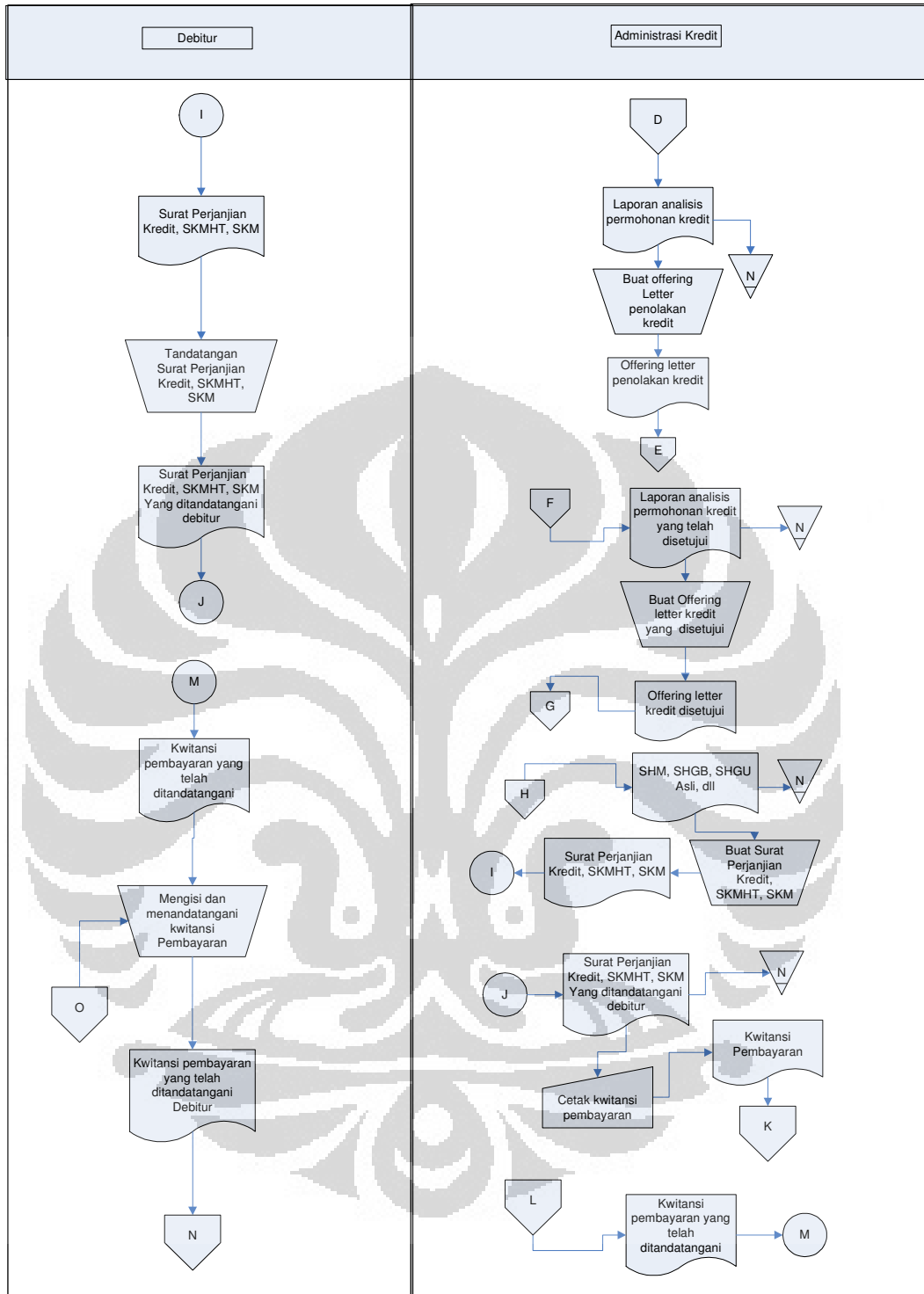
Gambar 4.4 Flowchart Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sumber : Diolah oleh Penulis



Gambar 4.5 Flowchart Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sumber : Diolah oleh Penulis



Gambar 4.6 Flowchart Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sumber : Diolah oleh Penulis

4.3 Evaluasi

4.3.1 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit

a. *Management Oversight and Control Culture* (Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian)

- a) Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Manajemen PT. BPR Bandung Kidul, manajemen menaruh perhatian yang serius terhadap kegiatan operasional perusahaan, ini ditunjukkan dengan adanya komunikasi yang terjalin antara manajemen dan karyawan untuk mengingatkan tentang pentingnya profesionalisme serta efektivitas pelaksanaan tugas kepada karyawan. Pengawasan oleh manajemen sangat penting dilakukan untuk memastikan prosedur serta kebijakan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik serta komunikasi yang terjadi antara atasan dengan bawahan akan meningkatkan motivasi bagi karyawan karena merasa diperhatikan sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif sehingga akan meningkatkan produktifitas karyawan.
- b) Setiap akhir bulan Bank melakukan evaluasi terkait kinerja karyawannya pada umumnya dan juga kinerja karyawan dalam hal pemberian kredit pada khususnya untuk menilai dan menemukan masalah yang terjadi dalam proses pemberian kredit sehingga bisa segera ditemukan solusinya agar tidak dapat mengganggu kinerja kegiatan operasional Bank. Dan setiap 6 bulan sekali Bank melakukan evaluasi terkait kegiatan operasionalnya untuk memastikan dipatuhinya kebijakan dan prosedur atas semua transaksi yang terjadi. Dan juga untuk menemukan kelemahan atas sistem pengendalian intern terkait pemberian kredit untuk dapat segera diperbaiki sehingga tidak akan mengganggu kegiatan operasional Bank.
- c) PT. BPR Bandung Kidul mempunyai program untuk meningkatkan kualitas karyawannya yaitu dengan memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan terkait dengan jabatan karyawan tersebut. Serta sejalan dengan peraturan perbankan yang selalu berubah maka Bank selalu menyesuaikan dengan memberikan pelatihan kepada seluruh

karyawan serta manajemen agar dapat mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai perubahan peraturan yang berlaku.

b. *Risk Recognition and Assessment (Identifikasi dan penilaian resiko)*

- a) Penilaian resiko sangat penting dilakukan dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko yang diidentifikasi oleh PT. BPR Bandung Kidul yang pertama adalah apabila petugas administrasi kredit salah memberikan informasi kepada calon debitur sehingga mereka akan enggan untuk menggunakan jasa Bank dan lebih memilih untuk dapat menggunakan jasa dari Bank pesaing sehingga akan merugikan Bank. PT. BPR Bandung Kidul melakukan pelatihan secara berkala serta manajemen selalu mengingatkan kepada karyawannya untuk selalu bekerja secara profesional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mereka miliki sehingga tidak terjadi masalah seperti petugas administrasi kredit yang salah memberikan informasi yang nantinya akan merugikan Bank karena mereka akan kehilangan para calon nasabah dan tidak mungkin lambat laun akan ditinggalkan oleh para nasabah mereka.
- b) Resiko yang kedua adalah *Account Officer (AO)* memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan sehingga akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan pemberian kredit. Bank tidak mempunyai satuan petugas khusus yang ditugaskan untuk menemani AO didalam kunjungannya ke debitur sehingga tidak bisa mengantisipasi terjadinya pemberian data yang tidak sesuai oleh AO. Salah satu cara Bank untuk menghindari masalah seperti ini adalah dengan melaksanakan proses perekrutan para calon karyawannya dengan sangat hati-hati sehingga mendapatkan karyawan yang kompeten serta mempunyai integritas yang baik.
- c) Resiko yang ketiga adalah Komite Kredit memberikan keputusan pemberian kredit berdasarkan penilaian subjektif bukan berdasarkan penilaian yang objektif sehingga dikhawatirkan terjadinya pemberian

kredit yang tidak sesuai dengan prosedur. Bank belum mempunyai pengendalian internal untuk mengantisipasi terjadinya resiko ini akan tetapi PT. BPR Bandung Kidul berusaha untuk selalu mengingatkan tentang pentingnya profesionalisme serta efektivitas pelaksanaan tugas kepada karyawan sehingga proses pemberian kredit dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

d) Resiko yang keempat adalah perubahan ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi berkembangnya usaha dari debitur sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi pengembalian pinjaman kredit. Apabila kondisi ekonomi masyarakat sedang bagus maka Debitur tidak mengalami kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya malah mungkin masyarakat dapat melunasi pinjaman kreditnya lebih cepat daripada waktu yang telah disepakati. Sebaliknya apabila kondisi ekonomi masyarakat sedang tidak bagus maka nasabah akan mengalami kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya malah mungkin masyarakat tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya. Untuk menghindari masalah seperti ini PT. BPR Bandung Kidul selalu memantau perkembangan yang ada didalam masyarakat melalui *Account Officer* karena petugas lapangan inilah yang sangat dekat dengan masyarakat karena berhubungan langsung dengan para debitur sehingga bisa mendapatkan data mengenai perkembangan ekonomi masyarakat yang bisa membantu Bank didalam pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan didalam pemberian kredit serta penyelamatan kredit.

e) Resiko yang kelima adalah debitur memiliki pemahaman yang lemah terkait pentingnya perjanjian kredit sehingga ada saja debitur yang tidak menepati perjanjian kredit yang telah dibuat dengan tidak melakukan pembayaran tepat waktu sehingga dapat mengakibatkan kredit macet. Untuk mengatasi masalah ini Bank menetapkan sanksi denda apabila ada debitur yang tidak menepati perjanjian kredit yang dalam hal ini apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian kreditnya, selain itu Bank juga telah berusaha secara persuasif

menghimbau kepada debitur untuk dapat mematuhi perjanjian kredit yang telah dibuat serta melakukan pembayaran tepat waktu pada saat pertama kali debitur melakukan permohonan kredit serta ketika kunjungan *Account Officer* ke lapangan.

c. *Control Activities and Segregation of Duties* (Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi)

- a) Bank melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan intern untuk menghindari adanya pemberian kredit yang tidak sehat seperti tidak adanya surat kepemilikan atas agunan, surat kepemilikan atas agunan tidak asli, atau adanya pemberian kredit fiktif, dan lain-lain.
- b) Bank melaksanakan pengendalian terhadap sistem informasi dalam bentuk elektronik yaitu dengan cara memberikan *password* yang berbeda untuk setiap jenis kegiatan yang berbeda contohnya karyawan Bagian simpanan mempunyai *password* berbeda dengan *password* yang dimiliki oleh karyawan bagian kredit sehingga tidak semua karyawan dapat mengakses setiap *database* sehingga data yang ada dapat terjaga keamanannya
- c) Kegiatan operasional Bank sangat ditunjang oleh aset fisik sehingga memungkinkan Bank untuk dapat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, oleh sebab itu PT. BPR Bandung Kidul melakukan pengendalian aset fisik agar kegiatan operasional Bank tidak mendapatkan gangguan. Pengendalian aset fisik yang dilakukan antara lain adalah dengan mendokumentasikan setiap transaksi yang terjadi dan mengumpulkannya dalam suatu tempat sehingga menjadi suatu file khusus seperti file tentang data nasabah kredit, kemudian Bank juga memberikan akses yang terbatas kepada pegawai tertentu untuk dapat mengakses data yang terdapat didalam database komputer Bank sehingga meminimalkan data rahasia perusahaan tidak bocor keluar. Untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Bank salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan

pemeriksaan fisik setiap bulan untuk menjamin bahwa aset fisik perusahaan tidak ada yang rusak atau bahkan hilang sehingga dapat mengganggu kegiatan operasional Bank. Bank juga mempunyai ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen penting yang dibuat dengan rangka baja dan didesain tahan api dan tahan gempa sehingga dokumen tersebut terjaga keamanannya. Bank juga memiliki satuan pengamanan untuk mengamankan aset fisik berupa gedung. Bank juga mempunyai ruangan khusus yang digunakan untuk menyimpan dokumen penting yang dibuat dengan rangka baja dan didesain tahan api dan tahan gempa sehingga dokumen tersebut terjaga keamanannya. Bank juga memiliki satuan pengamanan untuk mengamankan aset fisik berupa gedung. Akan tetapi penulis menemukan beberapa kelemahan terkait pengendalian aset fisik Bank yaitu tidak ada dinding sebagai perlindungan yang memisahkan antara *front office* dengan *back office*, tidak ada pintu yang dilengkapi dengan *ID Card* serta jumlah satuan pengamanan (*satpam*) yang tidak memadai dikarenakan jumlahnya hanya 2 orang saja dan bertugas secara bergantian setiap sehari sekali sehingga sangat rawan apabila ada orang yang tidak berkepentingan untuk dapat masuk ke ruangan tersebut dan dapat mencuri dokumen atau data penting Bank.

- d) Bank mempunyai dokumen tentang dengan kebijakan, prosedur, dan standar akuntansi yang berlaku terkait dengan kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat untuk memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku umum.
- e) Bank melakukan pemisahan tugas yang jelas untuk menghindari adanya benturan kepentingan didalam pengambilan keputusan khususnya pada proses pemberian kredit sehingga menghindari adanya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian kredit. Bank memisahkan fungsi antara *Account Officer* dengan Petugas Administrasi Kredit untuk menghindari adanya *conflict of interest* dari karyawan sehingga proses penerimaan permohonan pemberian kredit

yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Bank juga memisahkan fungsi antara pembuku dengan kasir untuk menghindari adanya *conflict of interest* yang dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya transaksi palsu, pengelapan dana, dan sebagainya.

d. *Accountancy, Information and Communication* (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi)

- a) Sistem akuntansi pemberian kredit dimulai dari pencatatan formulir permohonan kredit pada waktu pemberian kredit, pencatatan nomor induk debitur, penyetoran biaya pokok dan biaya bunga, daftar tagihan sampai pada pelunasan kredit sebagai dasar untuk pembuatan laporan keuangan sehingga informasi yang terdapat dilaporan keuangan sesuai dengan transaksi yang terjadi khususnya pada kegiatan pemberian kredit mikro dan sebagai alat ukur untuk mengetahui apakah setiap transaksi sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
- b) PT. BPR Bandung Kidul telah melaksanakan proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen setiap 6 bulan sekali untuk menjamin data akunting yang akurat dan konsisten dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku. Setiap penyimpangan yang terjadi segera diinvestigasi dan dicarikan solusi atas permasalahannya sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan
- c) Informasi dan komunikasi merupakan hal yang penting untuk merealisasikan semua tujuan sistem pengendalian intern. Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan dan memelihara informasi keuangan dan non-keuangan yang dapat dipercaya dan relevan serta mengkomunikasikan informasi ini dengan pengungkapan yang wajar dalam laporan yang tepat waktu, terkini, dan akurat.
- d) Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana

aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas, pedoman kebijakan, dan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan.

e. *Monitoring Activities and Correcting Deficiencies* (Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan)

- a) Direksi Bank secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional dari staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil kemajuan (realisasi) dibandingkan dengan target yang akan dicapai. PT. BPR Bandung Kidul juga melakukan evaluasi terhadap para karyawannya setiap akhir bulan, setiap karyawan akan dievaluasi oleh masing-masing kepala bagian, sedangkan untuk manajemen akan dievaluasi oleh RUPS setiap akhir tahun. Walaupun evaluasi kinerja operasional sudah dilaksanakan dengan frekuensi yang tepat akan tetapi dalam prosesnya evaluasi tersebut kurang baik karena manajemen mengevaluasi hanya berdasarkan data operasional perusahaan selama sebulan, alangkah lebih baik jika dalam evaluasi tersebut dilakukan evaluasi mengenai kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya seperti apakah sering tidak masuk kerja, apakah karyawan sering terlambat masuk kerja, apakah karyawan serius didalam pekerjaannya, dan sebagainya sehingga manajemen dapat memiliki pemahaman tentang keseriusan dan komitmen karyawan didalam melakukan pekerjaannya.
- b) Direktur serta Direktur Utama bergantian bertugas memantau kegiatan operasional di cabang dua hari dalam seminggu untuk memastikan kegiatan operasional dicabang telah dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Proses pemilihan hari kunjungan ke cabang dilakukan secara acak sehingga memungkinkan Direktur atau Direktur Utama untuk melihat kegiatan operasional cabang secara alami karena apabila hari kunjungan sudah ditentukan sebelumnya maka

dikhawatirkan kegiatan operasional dicabang tidak berjalan secara alami.

- c) Bank telah menetapkan satuan pengawasan intern yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan pengendalian intern serta efektivitasnya. Dengan demikian manajemen dapat mengetahui tentang pelaksanaan pengendalian internal serta penyimpangannya dan juga dapat mengetahui apabila ada kelemahan dari sistem pengendalian intern sehingga dapat segera diperbaiki. Akan tetapi jumlah satuan pengawas internal yang dimiliki oleh Bank sangat tidak memadai yaitu hanya 1 orang dan bertugas di kantor pusat sedangkan kegiatan pengawasan internal dicabang didelegasikan kepada Pimpinan Cabang. Dengan tidak memadainya jumlah satuan pengawas internal yang bertugas di kantor pusat maka dikhawatirkan tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif dan efektif apalagi dengan tidak memiliki satuan pengawas internal di kantor cabang dan mendelegasikan tugas pengawasan internal kepada Pimpinan cabang dikhawatirkan pengawasan pengendalian internal di kantor cabang tidak berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Pimpinan cabang sehingga akan dikhawatirkan laporan pengawasan internal yang dibuat tidak dapat mencerminkan pengawasan internal yang sesungguhnya.
- d) SPI melakukan analisis data operasional, kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran setiap 6 bulan sekali untuk mengevaluasi keakuratan data operasional yang dimiliki, dan mengevaluasi realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran. Walaupun Bank analisis data operasional, dan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada ketidakakuratan data operasional, dan tidak terlaksananya

realisasi rencana kerja anggaran maka tidak dapat segera dicarikan solusinya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

- e) Bank melakukan evaluasi pengendalian internnya setiap 6 bulan sekali untuk memastikan prosedur yang terkait kegiatan operasional dijalankan, dan untuk dapat menemukan kelemahan atau kelalaian didalam pengendalian intern yang dilakukan. Evaluasi pengendalian intern dilakukan ketika satuan pengawas intern melaporkan laporan pengawasan intern dengan cara menganalisis laporan tersebut. Selain itu Bank juga dapat mengevaluasi kecukupan atas sistem pengendalian intern yang berlaku sehingga dapat membantu Bank untuk dapat membuat sistem pengendalian intern yang lebih baik lagi di masa yang akan datang agar tidak terjadi lagi penyimpangan atas pengendalian. Walaupun Bank melakukan evaluasi pengendalian internnya, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada penyimpangan serta adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern, terjadinya ketidakakuratan data operasional, tidak dilaksanakannya prosedur terkait kegiatan operasional perusahaan, dan tidak terlaksananya realisasi rencana kerja anggaran maka tidak dapat segera dicarikan solusinya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa elemen pengendalian internal yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga penulis menemukan beberapa ketidaksesuaian pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dengan pedoman pengendalian intern Bank umum.

4.3.2 Evaluasi Pemberian Kredit Mikro

- a. Proses permohonan kredit dimulai ketika calon debitur mendatangi petugas administrasi kredit untuk mengajukan permohonan kredit yang kemudian akan diberikan formulir permohonan kredit untuk diisi secara lengkap dan benar. Bank telah menjalankan proses ini sesuai dengan prosedur akan tetapi terdapat kelemahan didalam dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit yaitu formulir permohonan kredit yang digunakan oleh PT. BPR Bandung Kidul tidak menggunakan penomoran dokumen (*pre-numberred document*) sehingga rawan terjadinya pemalsuan dokumen atau penghilangan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam proses ini sangat dibutuhkan pemahaman petugas administrasi kredit akan pemberian kredit sehingga bisa membantu calon debitur untuk dapat memahami akan informasi permohonan kredit yang diberikan oleh PT. BPR Bandung Kidul. Maka untuk mengatasi hal tersebut manajemen memberikan pelatihan kepada para karyawannya sehingga petugas administrasi kredit tidak memberikan informasi yang salah kepada calon debitur.
- b. Petugas administrasi kredit akan mencatat permohonan kredit tersebut kedalam registrasi permohonan kredit serta registrasi nomor induk debitur sehingga data aktivitas pemberian kredit akan selalu terbaharui. Setelah itu permohonan kredit tersebut akan diserahkan kepada AO untuk dilakukan pemeriksaan dan penelitian secara *on the spot* untuk menganalisa kelayakan serta meninjau keabsahan data yang diisi oleh calon debitur ketika mengisi formulir untuk menghindari pemberian kredit kepada calon debitur yang kurang atau tidak layak. Dalam proses ini seharusnya permohonan kredit diberikan dahulu kepada Direksi setelah itu Direksi akan memilih AO yang layak untuk melakukan penelitian secara *on the spot* akan tetapi dalam pelaksanaannya yang menentukan siapa petugas lapangan yang akan melakukan penelitian secara *on the spot* adalah petugas administrasi kredit, walaupun tidak dilaksanakannya proses tersebut sesuai prosedur tapi tidak akan mempengaruhi dari kegiatan pemberian kredit ataupun pengambilan keputusan pemberian kredit. Dan setelah AO

melakukan penelitian secara *on the spot* maka AO akan membuat laporan terkait kunjungan serta wawancara yang dilakukan terkait permohonan kredit debitur dengan menuangkannya dalam memorandum analisa kredit dan juga menganalisis apakah debitur tersebut layak diberi kredit dengan membuat dokumen putusan/ approval kredit, kemudian kedua dokumen tersebut akan diberikan kepada komite kredit yang terdiri atas analis kredit, Pimpinan Cabang, Direksi, Direksi Utama, Komisaris, dan Komisaris Utama untuk diverifikasi lagi kelengkapan datanya serta dianalisa apakah kredit tersebut layak diberikan.

- c. Petugas administrasi kredit akan membuat surat penawaran (*offering letter*) kepada calon debitur yang berisi pemberitahuan bahwa permohonan calon debitur telah mendapat persetujuan atau penolakan yang kemudian akan ditandatangani diatas materai dan menyerahkan semua dokumen asli jaminan, kemudian dokumen tersebut akan diteliti keabsahannya oleh petugas administrasi kredit. Dalam proses ini kegiatan pemberian kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- d. Tahap selanjutnya adalah pengikatan kredit yang dipersiapkan oleh petugas administrasi kredit, setelah itu diikuti dengan pengikatan jaminan. Dalam tahap ini tidak terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan prosedur pemberian kredit.
- e. Pencairan kredit dapat dilakukan apabila kwitansi pembayaran sudah diterbitkan dan kekasir terlebih dahulu meneliti dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan kwitansi untuk menghindari terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur. Dalam proses ini kegiatan pemberian kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- f. Setelah tahap realisasi maka Administrasi pinjaman membuat daftar angsuran yang harus ditagih dalam bulan yang bersangkutan dan disampaikan kepada petugas lapangan (AO) untuk memonitor penerimaan angsuran kredit pokok dan bunganya yang kemudian harus diberitahukan kepada debitur agar membayar sesuai tanggal dan jumlah kewajiban

angsuran. Bila sampai tanggal angsuran ternyata debitur belum melakukan pembayaran maka petugas lapangan (AO) mendatangi untuk memberitahukan kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Dalam proses ini kegiatan pemberian kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

g. Apabila terdapat kredit yang mulai tersendat pengembaliannya maka PT. BPR. Bandung Kidul akan memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis. Peringatan lisan diberikan kepada debitur dengan cara mendatangi debitur dan diberikan tenggat waktu sesuai analisis petugas lapangan untuk melunasi yang biasanya diberi waktu antara 1 minggu sampai 1 bulan untuk melakukan pembayaran. Kemudian peringatan tertulis diberikan bagi debitur yang telah mendapatkan peringatan lisan namun belum memenuhi kewajibannya. Peringatan tertulis diberikan dalam 3 tahapan berupa :

- a) Surat Peringatan I, akan diberikan setelah debitur diberikan peringatan lisan sebanyak 3 kali akan tetapi tidak juga melakukan pembayaran kredit.
- b) Surat Peringatan II, Setelah debitur diberikan Surat Peringatan I tetapi tidak juga melakukan pembayaran kredit maka debitur akan kembali diberikan peringatan lisan sebanyak 3 kali. Apabila setelah diberikan peringatan lisan masih belum melakukan pembayaran maka Bank akan memberikan Surat Peringatan II
- c) Surat Peringatan III, Setelah debitur diberikan Surat Peringatan II tetapi tidak juga melakukan pembayaran kredit maka debitur akan kembali diberikan peringatan lisan sebanyak 3 kali. Apabila setelah diberikan peringatan lisan masih belum melakukan pembayaran maka Bank akan memberikan Surat Peringatan III.

Dalam tahap ini kegiatan terdapat perbedaan antara prosedur yang ditetapkan dengan pelaksanaan dilapangan, perbedaan yang ditemui yaitu tenggat waktu yang diberikan kepada debitur untuk segera melunasi pembayarannya yaitu antara satu minggu sampai dengan satu bulan tergantung dari analisis kondisi keuangan debitur padahal secara prosedur

Bank memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagaimanapun kondisi keuangan debitur. Akan tetapi penyimpangan tersebut tidak menimbulkan masalah yang serius karena sebelum menentukan tenggat waktu pembayaran seorang petugas lapangan harus terlebih dahulu menganalisis apakah debitur tersebut dapat membayar lebih cepat atau tidak dan juga debitur dapat bernegosiasi terkait tenggat waktu yang diberikan apabila dirasa terlalu memberatkan.

- h. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar karena kredit yang seharusnya kembali tepat waktu dapat digunakan lagi oleh Bank untuk mendanai pemberian kredit yang baru.
- i. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Reconditioning* karena setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa *Reconditioning* dikhawatirkan akan semakin banyak kredit bermasalah yang mungkin akan mengalami kegagalan dalam pembayaran kredit sehingga akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar.
- j. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Restructuring* karena Bank setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan

sehingga dikhawatirkan akan menambah beban debitur dalam pembayaran kredit sehingga akan menyebabkan kegagalan dalam pembayaran kredit. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa *Restructuring* dikhawatirkan akan semakin banyak kredit bermasalah yang mungkin akan mengalami kegagalan dalam pembayaran kredit sehingga akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar.

- k. Akan tetapi apabila langkah diatas masih tidak membuahkan hasil dan nasabah tersebut masih kesulitan didalam pengembalian dana pinjamannya maka jalan yang terakhir yang akan ditempuh oleh PT. BPR Bandung Kidul adalah melakukan Penyitaan terhadap Aset Agunan/ eksekusi sehingga akan menyelamatkan dana Pihak ketiga yang digunakan oleh Bank dalam kegiatan pemberian kreditnya yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah. Dalam tahap ini tidak terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan prosedur pemberian kredit.

Pengendalian internal pemberian kredit yang baik akan tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Bank yang salah satu caranya adalah dengan membandingkan antara rencana kerja anggaran kredit mikro dengan realisasi. Pada tahun 2008 PT. BPR Bandung Kidul menetapkan dalam rencana kerja anggaran bahwa terdapat saldo kredit mikro sebesar Rp.2.058.409.000 akan tetapi realisasinya saldo kredit mikro yang terjadi adalah sebesar Rp.3.313.289.272 melebihi rencana kerja anggaran pemberian kredit mikro sebesar Rp.1.254.880.272 dengan demikian bisa dikatakan bahwa berdasarkan perbandingan data antara rencana kerja anggaran kredit mikro dengan realisasinya maka target saldo kredit mikro yang telah dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul telah tercapai.

Pengendalian internal pemberian kredit yang baik akan tercermin juga dari terlaksananya prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh Bank. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap pengendalian internal pemberian kredit mikro serta dokumen yang terkait dan juga berdasarkan wawancara penulis dengan karyawan serta manajemen PT. BPR Bandung Kidul dapat disimpulkan bahwa pemberian kredit mikro yang telah dilaksanakan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan karena masih ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan, walaupun demikian hal tersebut tidak akan mempengaruhi dari kegiatan pemberian kredit ataupun pengambilan keputusan pemberian kredit.

4.4 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Mikro yang Efektif

Sistem Pengendalian Intern merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Sistem pengendalian internal dalam PT. BPR Bandung Kidul telah berperan terhadap tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro dianggap berhasil apabila kredit tersebut dapat menunjang keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi hal ini dapat dilihat dari sedikitnya persentase jumlah kredit bermasalah yang hanya sekitar 1,53% atau senilai Rp.527.929.705. Kredit yang digunakan sesuai

dengan tujuan penggunaan kreditnya akan membantu kegiatan operasional usaha debitur sehingga usahanya tersebut akan berkembang dan mengalami peningkatan pendapatan sehingga debitur tidak mempunyai kesulitan dalam pengembalian kreditnya. Akan tetapi apabila debitur tersebut tidak menggunakan kredit tersebut sesuai dengan tujuan penggunaannya maka usaha yang dijalankan oleh debitur tidak akan mengalami kemajuan sehingga akan mengalami masalah dalam pengembalian kredit bahkan menjadi kredit macet.

Sistem pengendalian internal belum dapat berperan dalam tercapainya pelaksanaan pemberian kredit berdasarkan prosedur yang berlaku karena masih ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Bank. Dengan tidak dilaksanakannya prosedur dalam pemberian kredit Bank maka akan memperbesar kemungkinan terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat dan akan meningkatkan terjadinya pengembalian kredit yang bermasalah bahkan sampai terjadi kredit macet.

Kredit yang disalurkan oleh Bank telah mampu memberikan manfaat bagi debitur yang meminjamnya karena setelah diberikan kredit kegiatan operasional usaha mereka dapat kembali berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan pendapatan, serta membantu pengusaha mikro untuk dapat mengembangkan usahanya. Akan tetapi pengendalian internal belum dapat berperan optimal dalam pelunasan kredit karena masih terdapat pengembalian yang bermasalah sampai terjadinya kredit macet. Walaupun demikian nilai kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank masih dibawah batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sekitar 1,53% sedangkan persentase maksimal NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia adalah sekitar 5%. Dengan pengawasan yang memadai yang dilakukan secara kekeluargaan walaupun pengendalian internal Bank masih belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan pedoman standar pengendalian intern akan tetapi dapat meminimalkan penggunaan kredit oleh debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan penelitian atas pengendalian internal pemberian kredit mikro PT. BPR Bandung Kidul, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian internal kredit mikro pada PT. BPR Bandung Kidul yang digali dari lima unsur pengendalian internal yaitu *Management Oversight and Control Culture* (Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian), *Risk Recognition and Assessment* (Identifikasi dan penilaian resiko), *Control Activities and Segregation of Duties* (Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi), *Accountancy, Information and Communication* (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi), *Monitoring Activities and Correcting Deficiencies* (Pemantauan dan tindakan koreksi atas penyimpangan) belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada unsur pengendalian internal belum dilaksanakan dengan baik. Penulis juga masih mendapati kelemahan atas pengendalian internal Bank yaitu :
 - a. Bank tidak mempunyai satuan petugas khusus yang ditugaskan untuk menemani AO didalam kunjungannya ke debitur sehingga tidak bisa mengantisipasi terjadinya pemberian data yang tidak sesuai oleh AO
 - b. Bank belum mempunyai pengendalian internal untuk mengantisipasi terjadinya resiko Komite Kredit memberikan keputusan pemberian kredit berdasarkan penilaian subjektif bukan berdasarkan penilaian yang objektif sehingga dikhawatirkan terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur

- c. pengendalian fisik Bank yang lemah karena untuk dapat memasuki ruangan *Back office* tidak terdapat perlindungan yang memadai seperti pintu yang dilengkapi dengan *ID Card* atau jumlah satuan pengamanan (satpam) yang tidak memadai dikarenakan jumlahnya hanya 2 orang saja dan bertugas secara bergantian setiap sehari sekali sehingga sangat rawan apabila ada orang yang tidak berkepentingan untuk dapat masuk ke ruangan tersebut dan dapat mencuri dokumen atau data penting Bank.
- d. Walaupun Bank melakukan analisis data operasional, dan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada ketidakakuratan data operasional
- e. Walaupun Bank melakukan evaluasi pengendalian internnya, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada penyimpangan serta adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern maka tidak dapat segera dicarikan solusinya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- f. Dengan tidak memadainya jumlah satuan pengawas internal yang bertugas di kantor pusat maka dikawatirkan tidak dapat melakukan pengawasan secara intensif dan efektif apalagi dengan tidak memiliki satuan pengawas internal di kantor cabang dan mendelegasikan tugas pengawasan internal kepada

Pimpinan cabang dikhawatirkan pengawasan pengendalian internal di kantor cabang tidak berjalan dengan baik karena tidak ada yang mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari Pimpinan cabang sehingga akan dikhawatirkan laporan pengawasan internal yang dibuat tidak dapat mencerminkan pengawasan internal yang sesungguhnya.

- g. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar karena kredit yang seharusnya kembali tepat waktu dapat digunakan lagi oleh Bank untuk mendanai pemberian kredit yang baru.
- h. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Reconditioning* karena setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa *Reconditioning* dikhawatirkan akan semakin banyak kredit bermasalah yang mungkin akan mengalami kegagalan dalam pembayaran kredit sehingga akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar.

- i. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank tidak melakukan *Restructuring* karena Bank setelah dilakukan penyelamatan kredit debitur tetap tidak dapat melakukan pembayaran kredit pada waktu yang telah ditentukan sehingga dikhawatirkan akan menambah beban debitur dalam pembayaran kredit sehingga akan menyebabkan kegagalan dalam pembayaran kredit. Apabila terdapat kredit bermasalah Bank hanya memberikan peringatan lisan dan peringatan tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran kredit dan terus memonitor pembayaran kredit debitur sampai kredit tersebut lunas. Dengan tidak dilaksanakannya penyelamatan kredit berupa *Restructuring* dikhawatirkan akan semakin banyak kredit bermasalah yang mungkin akan mengalami kegagalan dalam pembayaran kredit sehingga akan mempengaruhi kegiatan operasional Bank dalam hal pendanaan sehingga Bank tidak dapat lagi menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar.
2. Pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank sudah efektif karena tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal PT. BPR Bandung Kidul mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit mikro karena dengan tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian atas pengendalian internal pemberian kredit mikro PT. BPR Bandung Kidul, penulis memberikan saran terkait permasalahan yang terjadi dan diharapkan dapat membantu Bank agar pengendalian internalnya bisa lebih baik lagi.

1. Bank menetapkan satuan petugas khusus yang ditugaskan untuk menemani AO didalam kunjungannya ke debitur sehingga bisa mengawasi kegiatan AO selama dilapangan untuk mengantisipasi terjadinya pemberian data yang tidak sesuai oleh AO.
2. Bank membuat kebijakan pengendalian internal untuk mengantisipasi terjadinya resiko Komite Kredit memberikan keputusan pemberian kredit berdasarkan penilaian subjektif bukan berdasarkan penilaian yang objektif sehingga dikhawatirkan terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya komite kredit tidak boleh memproses sebuah permohonan kredit debitur yang masih mempunyai keterkaitan dengan mereka baik secara garis keluarga maupun kerabat atau tetangga.
3. Bank seharusnya menerapkan pengendalian asset fisik lebih baik lagi berupa penambahan personil satuan pengawas pengamanan di dalam Bank serta penerapan pintu yang dilengkapi *Scanner ID Card*, dan menambahkan dinding yang berfungsi untuk memisahkan *front office* dengan *back office*. Sebaiknya Bank memiliki kamera pengintai (CCTV) untuk dapat mengawasi keadaan disekitar Bank sehingga dapat meminimalkan resiko ada orang yang tidak berkepentingan masuk kedalam area yang masuk kedalam ruangan kerja
4. Walaupun Bank melakukan analisis data operasional, dan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada ketidakakuratan data operasional, dan tidak terlaksananya realisasi rencana kerja anggaran maka tidak dapat segera

dicarikan solusinya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.. Sebaiknya evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali agar apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian internal atau ada kelemahan didalam pengendalian internal maka dapat segera dicarikan solusinya.

5. Walaupun Bank melakukan evaluasi pengendalian internnya, akan tetapi frekuensi evaluasi dirasakan kurang memadai dikarenakan evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali, frekuensi evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Bank menurut penulis masih belum mencukupi karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi sangat lama sehingga apabila ada penyimpangan serta adanya kelemahan atas sistem pengendalian intern maka tidak dapat segera dicarikan solusinya yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Sebaiknya evaluasi dilakukan minimal 3 bulan sekali agar apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian internal atau ada kelemahan didalam pengendalian internal maka dapat segera dicarikan solusinya.
6. Bank menambah jumlah satuan pengawas internal yang bertugas di kantor pusat agar dapat melakukan pengawasan secara intensif dan efektif, mempekerjakan satuan pengawas internal di kantor cabang dengan jumlah yang memadai sehingga dapat melakukan pengawasan secara intensif dan efektif, dan laporan pengawasan internal yang dibuat dapat mencerminkan pengawasan internal yang sesungguhnya dan dapat dipercaya.
7. Bank melakukan Penjadwalan Ulang (*Reschedulling*) apabila terdapat kredit bermasalah untuk membantu debitur dalam pengembalian kreditnya sehingga dana yang digunakan Bank untuk pemberian kredit bisa digunakan kembali untuk menyalurkan kredit dan dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar dan agar Bank tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak dapat membayar biaya bunga yang telah ditetapkan.

8. Bank melakukan *Reconditioning* apabila terdapat kredit bermasalah untuk membantu debitur dalam pengembalian kreditnya sehingga meminimalkan terjadinya kredit macet. Dengan dilakukannya *Reconditioning* diharapkan dapat menyelamatkan dana yang digunakan Bank untuk pemberian kredit sehingga bisa digunakan kembali untuk menyalurkan kredit dan dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar dan agar Bank tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak dapat membayar biaya bunga yang telah ditetapkan.
9. Bank melakukan *Restructuring* apabila terdapat kredit bermasalah untuk membantu debitur dalam pengembalian kreditnya sehingga meminimalkan terjadinya kredit macet. Dengan dilakukannya *Reconditioning* diharapkan dapat menyelamatkan dana yang digunakan Bank untuk pemberian kredit sehingga bisa digunakan kembali untuk menyalurkan kredit dan dapat menyalurkan kredit dalam jumlah yang besar dan agar Bank tidak mengalami kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak dapat membayar biaya bunga yang telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Elder, Randal J. Beasley, Mark S. Arens, Alvin A. (2012). *Auditing And Assurance Services An Integrated Approach : An Indonesian Adaptation*. 14th edition. Prentice Hall.
- I Gusti Agung Rai. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Siagian, Sondang P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan ketiga belas, Bumi Aksara, Jakarta.
- Suyatno, Thomas. H.A.Chalik.,Sukada. Made, Ananda. Yuniarti, C. Tinon. Djuhaepah, T. Marala. (2007) . *“Dasar-Dasar Perkreditan”*. Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2007). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Wardoyo, Prabowo.Hendro. (2003). *Model Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Kredit Mikro Koperasi Warga Kesuma Tiara, Jakarta*
<http://wardoyo.staff.gunadarma.ac.id/Publications/files/187/jurnalEKONOMI-bc.pdf>
- Hermiyetti. (2010). Pengaruh penerapan pengendalian internal terhadap Pencegahan fraud pengadaan barang. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Volume 14, nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Surat Keputusan Bank Indonesia No.31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Emp



PT. BPR BANDUNG KIDUL

Alamat : Jl. Raya Pangalaengan No. 340 - Pangalengan - Bandung 40378
Telepon: 022-5979340 Fax: 022-5979569

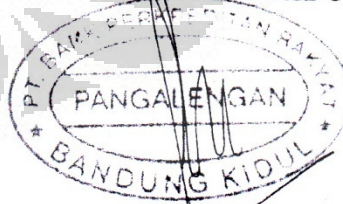
SURAT PENGANTAR No. B.045/BPR/03/2009

Kepada : Yth. Pemimpin Bank Indonesia
Bandung

Dari : PT. BPR Bandung Kidul
Pangalengan

No.	Uraian	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none">Koreksi Laporan Publikasi Triwulan IV bulan Desember 2008, sehubungan adanya pemeriksaan Akuntan Publik.	Dikirim Dengan Hormat agar menjadi maklum.
	Memenuhi : <ul style="list-style-type: none">PBI Nomor :8/20/PBI/2006 Tanggal 05 Oktober 2006 Tentang Transparasi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat	

Pangalengan, 05 Maret 2009
**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANDUNG KIDUL**



H.W.HERMANSYAH, SE.
Dirut

LAPORAN LABA RUGI
PT. BPR Bandung Kidul
 Tanggal : 31 Desember 2008

(Ribuan Rp)

POS-POS	Posisi Desember 2008	Posisi Desember 2007
PENDAPATAN		
Pendapatan Operasional		
a. Bunga	3,275,995	2,970,099
b. Provisi dan Komisi	439,245	362,734
c. Lainnya	111,730	0
Jumlah Pendapatan Operasional	3,826,970	3,332,833
Pendapatan Non Operasional	14,115	166,143
Jumlah Pendapatan	3,841,085	3,498,976
BEBAN		
Beban Operasional		
a. Beban bunga	1,040,634	952,079
b. Beban administrasi dan umum	397,202	355,956
c. Beban Personalia	1,423,207	1,245,621
d. Penyisihan aktiva produktif	352,697	241,552
e. Beban operasional lainnya	72,896	50,878
Jumlah beban operasional	3,286,636	2,846,086
Beban non operaasional	41,066	170,312
Jumlah beban	3,327,702	3,016,398
Laba/rugi sebelum pajak penghasilan (PPh)	513,383	482,578
Taksiran pajak penghasilan	127,778	102,500
Laba/rugi tahun berjalan	385,605	380,078

NERACA
PT. BPR Bandung Kidul
Tanggal : 31 Desember 2008

(Ribuan
Rp)

No	POS-POS	Posisi Desember 2008	Posisi Desember 2007
	AKTIVA		
1	Kas	176,972	427,073
2	Sertifikat Bank Indonesia	0	0
3	Antarbank Aktiva		
	a. Pada bank umum	2,517,769	687,256
	b. Pada BPR	0	300,000
4	Kredit yang diberikan		
	a. Pihak terkait	72,852	100,639
	b. Pihak tidak terkait	11,125,394	9,509,533
5	Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	417,554	472,121
6	Aktiva dalam valuta asing	0	0
7	Aktiva tetap dan inventaris		
	a. Tanah dan gedung	401,189	401,189
	b. Akumulasi penyusutan gedung -/-	54,664	42,024
	c. Inventaris	725,318	660,913
	d. Akumulasi penyusutan inventaris -/-	509,780	446,352
8	Aktiva Lain-lain	197,663	247,746
	Jumlah Aktiva	14,235,159	11,373,852

No	POS-POS	Posisi Desember 2008	Posisi Desember 2007
	PASIVA		
1	Kewajiban-kewajiban yang segera dapat dibayar	105,367	123,932
2	Tabungan	0	0
	a. Pihak terkait	1,766,150	685,469
	b. Pihak tidak terkait	4,574,367	2,649,274
3	Deposito berjangka	0	0
	a. Pihak terkait	1,685,000	357,500
	b. Pihak tidak terkait	2,246,200	3,736,200
4	Kewajiban kepada Bank Indonesia	0	0
5	Antarbank pasiva	1,975,000	2,033,286
6	Pinjaman yang diterima	0	0
7	Pinjaman subordinasi	0	0
8	Rupa-rupa Pasiva	93,197	76,460
9	Ekuitas :	0	0
	a. Modal dasar	2,000,000	2,000,000
	b. Modal yang belum disetor -/-	800,000	800,000
	c. Agio	0	0
	d. Disagio -/-	0	0
	e. Modal sumbangan	0	0
	f. Modal pinjaman	0	0
	g. Dana setoran modal	0	0
	h. Cadangan revaluasi aktiva tetap	0	0
	i. Cadangan umum	93,616	93,616
	j. Cadangan tujuan	17,555	17,555
	k. Laba yang ditahan	93,102	20,482
	l. Saldo Laba (Rugi) tahun berjalan	385,605	380,078
	Jumlah Pasiva	14,235,159	11,373,852

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. BPR Bandung Kidul
Tanggal : 31 Desember 2008

(Ribuan Rp)

POS-POS	Posisi Desember 2008	Posisi Desember 2007
KOMITMEN		
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	0	0
2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	0	0
3. Lain-lain	0	0
JUMLAH KOMITMEN	0	0
KONTINJENSI		
1. Pendapatan bunga dalam penyelesaian	183,142	179,511
2. Lain-lain	354,283	436,490
JUMLAH KONTINJENSI	537,425	616,001

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF & INFORMASI LAINNYA

PT. BPR Bandung Kidul
Tanggal : 31 Desember 2008

(Ribuan Rp)

KETERANGAN	Posisi Tanggal Laporan				
	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	1,491,310	0	0	0	1,491,310.00
2. Kredit yang diberikan					
a. Kepada pihak terkait	72,852	0	0	0	72,852.00
b. Kepada pihak tidak terkait	10,597,465	102,280	158,263	267,386	11,125,394.00
3. Jumlah Aktiva Produktif	12,161,627	102,280	158,263	267,386	12,689,556.00
4. NPL Net (%)					1.53
5. Rasio KPMM (%)					165.00
6. Loan to Deposit Ratio (%)					809.00
7. Return on Asset (ROA) (%)					36.00

PENGURUS BANK	PEMILIK BANK
Dewan Komisaris :	
1. Hj. Rahmi Hartini	1. KPBS Pangalengan (99.00%)
2. H. Engkun Maskun	2. H. Tavip Danu Widjaja (1.00%)
Direksi:	Pemegang Saham Pengendali :
1. H. W. Hermansyah, SE.	1. KPBS Pangalengan
2. Hendra Turga D., SE.	

* Nama Kantor Akuntan Publik : ARIFIN, HALID DAN REKAN
 * Akuntan Publik yang menandatangani laporan : H.R. ARIFIN WIRAKUSUMAH

Catatan:

* Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No.8/30/DPBPR tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR
 * Bagi BPR dengan total asset Rp.10 Milyar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan Publik yang bertanggungjawab terhadap audit (partner in-charge)

Kab. Bandung , 31 Desember 2008

Direksi
PT. BPR Bandung Kidul

1. H. W. Hermansyah,
SE.

2. Hendra Turga D.,
SE.

